

DESA MEMBANGUN

Participatory Learning and Action pada Multiliterasi Masyarakat Desa Wisata

Mintarsih Arbarini
Tri Suminar
Lilie Desmawati



Desa Membangun:
Participatory Learning and Action
pada Multiliterasi Masyarakat Desa Wisata

**Desa Membangun:
Participatory Learning and Action
pada Multiliterasi Masyarakat
Desa Wisata**

Dr. Mintarsih Arbarini, M.Pd

Dr. Tri Suminar, M.Pd

Dra. Liliek Desmawati, M.Pd



**Desa Membangun:
Participatory Learning and Action pada Multiliterasi
Masyarakat Desa Wisata**

Hak Cipta © Mintarsih Arbarini, et al.

All right reserved

Penulis:

Mintarsih Arbarini

Tri Suminar

Liliek Desmawati

Editor:

All Fine Loreta

Tata Letak: Thomas Sugeng Hariyoto

Desain Sampul: Yudi Siswanto dan Rista Prastiwi

Cetakan I, 2020



Penerbit Fastindo

Jl. Prof. Sudarto LPPU II 12 A,

Tembalang, Semarang

Telp. (024) 764 805 90

Email: fstindo@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan system penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN 978-602-6627-85-8

PRAKATA

Terjadi perubahan besar pada semangat pembangunan desa saat ini, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini menempatkan desa sebagai subjek pelaku pembangunan. Kini warga desa melalui struktur yang ada memiliki wewenang penuh menjalankan pembangunan desanya. Peran desa tidak terbatas hanya sebagai struktur pemerintahan terkecil, tetapi justru menjadi subjek perubahan. Modal yang diberikan sebagai bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada desapun tidak sedikit, selain aset dan potensi yang ada di desa juga ditambah dana desa yang jumlahnya besar. Paradigma ini disebut sebagai desa membangun.

Desa membangun menempatkan posisi desa bukan lagi sebagai objek melainkan subjek langsung yang memegang kendali perubahan. Oleh sebab itu, cakupan desa membangun tidak lagi hanya pembangunan fisik seperti pembangunan infrastruktur namun kualitas sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas masyarakat desa menjadi salah satu agenda yang tidak dapat terpisahkan dari paradigma desa membangun, salah satu upaya yang dilakukan untuk membangun kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan multiliterasi sebagai praktik pendidikan.

Pengembangan multiliterasi yang mengacu pada kemandirian masyarakat merupakan tekanan khusus yang seringkali menjadi patokan dan sebagai prinsip dasar. Oleh karena itu, multiliterasi yang dikembangkan akan lebih tepat apabila berbasis partisipasi masyarakat dengan menitikberatkan pada proses dari, oleh, dan untuk masyarakat. Multiliterasi bertujuan mengembangkan kemampuan literasi yang beragam dengan harapan masyarakat dapat menggunakan untuk pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Partisipasi masyarakat desa melalui *Participatory learning and action (PLA)* atau pembelajaran dan

kaji tindak secara partisipatif mampu menumbuhkan motivasi pada orang dewasa sehingga pembelajaran yang dilakukan di masyarakat pedesaan lebih bermakna dan melibatkan diri secara keseluruhan proses baik secara mental maupun fisik untuk meningkatkan pembangunan desa.

Belum banyak buku yang mengupas tentang desa membangun melalui partisipatif masyarakat dan bahkan belum ada karya buku pembelajaran dan kaji tindak secara partisipatif dalam meningkatkan multiliterasi di masyarakat desa. Untuk itu, buku ini dikembangkan dari penelitian yang diharapkan dapat memperkaya wawasan para pegiat literasi mulai dari akademisi, praktisi, dan warga masyarakat desa sebagai aktor utamanya. Hadirnya buku ini diharapkan mampu mengakselerasi masyarakat desa dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan di desa wisata.

Pada akhir penulisan buku ini, penulis mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan segala kemudahan kepada penulis sehingga buku ini bisa terselesaikan dengan baik. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik yang telah langsung maupun tidak langsung membantu terselesaikannya buku ini.

Akhirnya, semoga karya buku ini bermanfaat, meskipun laksana setetes embun pagi di padang rumput yang luas.

Semarang, Desember 2020

Penulis,

Mintarsih Arbarini

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I. Desa Membangun	1
1.1. Paradigma Desa Membangun	1
1.2. Konsep Desa Membangun	9
1.3. Desa Membangun: Pengembangan Desa Wisata	14
BAB II. Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Membangun	21
2.1. Partisipasi Masyarakat Desa	21
2.2 Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Desa	24
2.3 Pentingnya Partisipasi Masyarakat Desa	28
BAB III. Participatory Learning and Action	31
3.1. Pengertian Participatory Learning and Action (PLA)	31
3.2. Prinsip-Prinsip Participatory Learning and Action (PLA)	36
3.2. Media Participatory Learning and Action (PLA)	38
BAB IV. Pelaksanaan Participatory Learning and Action	41
4.1. Pembelajaran Participatory Learning Action	41
4.2. Menjadi Pembelajar	43
4.3. Motivasi untuk Belajar	46
4.4. Hambatan Komunikasi	48
4.5. Penerapan Participatory Learning and Action	52
4.6. Dari Manipulasi ke Fasilitasi	54
4.7. Pentingnya Umpan Balik	57

BAB V. Tahapan Participatory Learning and Action	61
5.1. Persiapan Dasar	61
5.2. Tujuan Pembelajaran.....	62
5.3. Mengenali Partisipan.....	63
5.4. Pilihan Lokasi Dan Ruang	49
5.5. Pengaturan Kursi	65
5.6. Waktu Sesi Pembelajaran.....	65
5.7. Rangkaian Kegiatan dan Isi Sesi.....	66
5.8. Metode Pembelajaran.....	67
5.9. Setelah Fasilitator Selesai	71
BAB VI Multiliterasi pada Masyarakat	75
6.1.Literasi.....	75
6.2. Multiliterasi pada Masyarakat.....	79
BAB VII. Penutup.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
GLOSARIUM.....	105
TENTANG PENULIS.....	114

BAB I

DESA MEMBANGUN

1.1. Paradigma Desa Membangun

Desa membangun memiliki banyak keunggulan karena warga desa menjadi terlibat dalam proses membangun desanya. Paradigma ini memungkinkan warga desa menentukan sendiri prioritas dan visi pembangunannya sendiri karena keputusan dalam musyawarah desa. Meskipun sama-sama membangun ruas jalan atau infrastruktur, hasilnya pasti berbeda karena partisipasi warga desa membuat manfaat program menjadi jauh lebih besar (Utoro, 2015).

Perubahan besar pada semangat pembangunan desa terjadi sejak disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini menempatkan desa sebagai subjek pelaku pembangunan. Pembangunan desa mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Dalam implementasi program tidak cukup hanya menyediakan basis dukungan finansial terhadap rakyat, tetapi juga mendorong usaha ekonomi desa dalam arti luas. Penciptaan kegiatan-kegiatan yang membuka akses produksi, distribusi, dan pasar bagi rakyat desa dalam pengelolaan kolektif dan individu harus berkembang dan berlanjut. Goulet (Todaro, 1981) mengemukakan adanya tiga inti nilai-nilai dalam membangun, yaitu: 1) Swa sembada, merupakan kemampuan masyarakat dalam memenuhi atau mencukupi kebutuhan dasar yang mencakup sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dasar, dan keamanan. 2) Harga Diri, merupakan kepercayaan diri untuk tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka atau hidup dalam penindasan. 3) Kebebasan, merupakan kemampuan

untuk memilih alternative bagi perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakatnya.

Warga desa melalui struktur yang ada memiliki wewenang penuh menjalankan pembangunan desanya. Situasi ini berbeda dengan pola pembangunan desa yang dahulu dijalankan sebelum lahirnya UU Desa. Pembangunan desa ditentukan oleh struktur di atas desa yakni kecamatan, kabupaten dan provinsi. Desa sebagai pemilik kedaulatan hanya berperan sebagai penonton. Akibatnya, pembangunan desa seringkali tidak sesuai kebutuhan dan sebagian besar jauh dari target yang ingin dicapai. Hal inilah, yang perlu diberikan perombakan dalam memajukan desa. Wrihatnolo dan Dwijiwinoto (Mardikanto, 2009) mengemukakan pergeseran paradigm pembangunan meliputi; 1) Strategi pertumbuhan, 2) pertumbuhan dan distribusi, 3) teknologi tepat guna, 4) kebutuhan dasar, 5) pembangunan berkelanjutan, dan 6) pemberdayaan.

Masyarakat desa terdorong menjadi mandiri dalam merumuskan langkahnya membangun kesejahteraan desa. Warga masyarakat juga menjadi jauh lebih bersemangat menjalankan pembangunan desanya karena mereka memiliki hak dan wewenang menentukan apa yang desa mereka butuhkan. Kini, mereka bisa mengelola potensinya secara swakelola, cara ini bisa menciptakan efisiensi tinggi. Rahim (2002) menyampaikan adanya pelaku dalam desa membangun meliputi: 1) Sekelompok kecil warga masyarakat yang merumuskan perencanaan dan berkewajiban untuk mengorganisasi dan menggerakkan warga masyarakat yang lain untuk berpartisipasi dalam desa membangun. 2) Masyarakat luas yang berpartisipasi dalam proses desa membangun, baik dalam pemberian inpu, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan pengawasan serta pemanfaatan hasil pembangunan.

Pembangunan desa saat ini juga sudah tidak identik dengan pembangunan fisik lagi. Selama ini, pembangunan selalu diartikan sebagai

pembangunan fisik, karena program fisik lebih mudah terlihat dan menimbulkan nilai proyek tertentu sehingga bisa menjadi sumber pendapatan bagi pihak yang mengerjakannya. Namun, saat ini persepsi itu mulai bergeser. Pembangunan sebagai langkah yang juga melingkupi masalah pemberdayaan sumber daya sehingga program-program penguatan kapasitas sumber daya manusia yang dahulu dianggap tidak penting kini sudah mulai dianggap agenda prioritas yang layak didahulukan.

Perubahan yang paling menonjol, desa dapat mengelola sendiri dana untuk membangun desanya dengan tenaga kerja mereka sendiri. Sebelumnya, desa adalah objek pembangunan yang bahkan tidak memiliki kesempatan memikirkan kebutuhannya sendiri karena semuanya ditentukan oleh struktur di atasnya. Mewujudkan pembangunan dari desa merupakan sebuah visi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Program Dana Desa. Program yang bergulir ini telah mendorong pembangunan yang masif di desa. Sebuah langkah yang patut diapresiasi dan tentunya dilaksanakan dengan konsep strategis untuk mencapai hasil yang optimal. Pemerintah menetapkan pola baru dalam pemanfaatan dana desa se-Indonesia, difokuskan kepada padat karya atau yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat di desa.

Dalam rangka membangun di era reformasi, mewujudkan pemerintahan yang baik menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditawar lagi dan mutlak terpenuhi. Pemerintah desa yang baik secara umum dimaknai sebagai konsensus yang dicapai pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab (UNDP, 1997). Namun, pembangunan komprehensif dan lebih kontekstual di tingkat desa dijelaskan oleh Dwipayana dan Eko (2003) bahwa selama ini menekankan pada tiga poros utama yaitu negara, masyarakat sipil, dan pasar.

Pemetaan pemerintah di desa terdiri dari empat elemen utama yaitu pemerintah desa, masyarakat politik (Badan Perwakilan Desa), masyarakat

sipil (institusi dan organisasi sosial), dan masyarakat ekonomi (organisasi masyarakat ekonomi). Dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan penerapan prinsip-prinsipnya maka upaya kemandirian desa dapat tercapai.

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang secara keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini untuk meningkatkan pendapatan dan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Dalam implementasinya, pemerintah kabupaten/kota menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaannya.

Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa. Pembangunan desa merupakan bentuk kelembagaan desa yang memiliki kegiatan menjalankan usaha ekonomi atau bisnis untuk memperoleh manfaat yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat desa. Desa mendirikan pembangunan desa bukanlah semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomis, tetapi meliputi pula manfaat sosial dan manfaat nonekonomi lainnya.

Beberapa peluang pengembangan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BuMDes) menggerakkan potensi lokal sebagai upaya perwujudan desa membangun, menurut Dwipayana dan Eko (2003) antara lain:

Pertama, bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Peluang pengembangan jenis-jenis usaha dalam klasifikasi ini paling menarik karena kebutuhan dan potensi di desa relatif tersedia. Sebagai contoh unit usaha dalam badan usaha desa dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan

teknologi tepat guna yang meliputi air minum desa, usaha listrik desa, SPBU Desa, lumbung pangan, serta sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Kedua, bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa, misalnya menjalankan kegiatan usaha penyewaan yang meliputi alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik desa, dan barang sewaan lainnya. Peluang tersebut untuk menjalankan jenis-jenis usaha ini juga sangat besar karena usaha ini relatif mudah untuk dijalankan.

Ketiga, usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. Kegiatan usaha perantara yang dapat dikembangkan, misalnya jasa pembayaran listrik, jasa penyaluran pupuk bersubsidi, dan pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat.

Keempat, bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Misalnya, pemasaran hasil perikanan, sarana produksi pertanian, produksi kerajinan desa, dan pemasaran komoditas atau produk unggulan desa.

Kelima, bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa yang dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Pengembangan Lembaga Perkreditan Desa, Lembaga Kredit Mikro, dan koperasi merupakan contoh jenis usaha yang dapat dikembangkan dalam klasifikasi usaha ini. Peran bisnis keuangan ini adalah menghubungkan warga yang memiliki kelebihan dana dengan warga yang membutuhkan dana.

Keenam, usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan pedesaan. Misalnya, desa wisata yang mengorganisasi rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat, terminal agribisnis desa/kawasan pedesaan yang mengatur tata niaga beberapa komoditas unggulan desa, dan kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pemilihan dan penentuan jenis usaha yang akan dijadikan unit bisnis BumDes harus dilakukan dengan seksama dan pertimbangan yang matang. Jenis-jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh BumDes harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi di desa serta peluang pasar yang menjanjikan. Sehingga unit usaha tersebut mampu memberikan keuntungan bagi BumDes melalui nilai tambah ekonomi dan pasar dari bisnis.

Utoro (2000) menyampaikan bahwa paradigma desa membangun telah diterapkan, khususnya dalam program-program pemberdayaan untuk penanggulangan kemiskinan yang masuk ke desa, seperti PNPM Mandiri Pedesaan. PNPM berparadigma baru, tetapi tetap tidak kontekstual dengan desa atau tidak memperhatikan locus dan skala, serta tidak berorientasi pada pembangunan pedesaan maupun pembangunan desa. Karena itu UU Desa secara tegas membedakan antara membangun desa yang merupakan domain pemerintah dan pembangunan desa (desa membangun) yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Berikut ini, secara utuh dan sistematis melakukan elaborasi perbedaan antara pembangunan pedesaan (membangun desa) yang merupakan domain pemerintah dan desa membangun pada tabel berikut.

Paradigma Lama dan Baru Pembangunan Perdesaan

Paradigma lama	Paradigma baru
<ul style="list-style-type: none"> • Fokus pada pertumbuhan ekonomi • Redistribusi oleh negara • Otoritarianisme ditolerir sebagai harga yang harus dibayar karena pertumbuhan • Negara memberi subsidi pada pengusaha kecil • Negara menyediakan layanan sosial • Transfer teknologi dari negara maju • Transfer aset-aset berharga pada negara maju • Pembangunan nyata: diukur dari nilai ekonomis oleh pemerintah • Sektoral • Organisasi hirarkhis untuk melaksanakan proyek • Peran negara: produser, penyelenggara, pengatur dan konsumen terbesar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan • Proses demokrasi dan keterlibatan warga marginal dalam pengambilan keputusan • Menonjolkan nilai-nilai kebebasan, otonomi, harga diri, dll. • Negara membuat lingkungan yang memungkinkan • Pengembangan institusi lokal untuk ketahanan sosial • Penghargaan terhadap kearifan dan teknologi lokal; pengembangan teknologi secara partisipatoris • Penguatan institusi untuk melindungi aset komunitas miskin. • Pembangunan adalah proses multidimensi dan sering tidak nyata yang dirumuskan oleh rakyat. • Menyeluruh dan terpadu • Organisasi belajar non-hirarkhis • Peran negara: menciptakan kerangka legal yang kondusif, membagi kekuasaan, mendorong tumbuhnya institusi-institusi lokal

Sumber: diadaptasi dan dimodifikasi dari Andrew Shepherd (1998).

Membangun desa menjadi bagian dari pembangunan perdesaan. Literatur pembangunan perdesaan begitu kaya, dinamis dan transformatif. Terdapat perubahan dari paradigma lama (dekade 1960-an hingga 1980-an) menuju paradigma baru (dekade 1990-an hingga sekarang). Paradigma lama bersifat *state centric*: otkratis, top down, sentralistik, hirarkhis, sektoral dan seterusnya. Paradigma baru tampaknya mengandung spirit rekognisi dan subsidiaritas yang bersifat *society centric*: demokratis, bottom up, otonomi, kemandirian, lokalitas, partisipati, emansipatoris dan seterusnya (Eko, et.,al. 2014).

Desa membangun adalah spirit UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah supradesa menjadi pihak yang memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa melalui skema kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan subsidiaritas. Supra desa tak perlu takut dengan konsekuensi pemberlakuan kedua azas tersebut. Dengan menjadi

subjek pembangunan justru desa tidak lagi akan menjadi entitas yang merepotkan tugas pokok pemerintah kabupaten, provinsi bahkan pusat. Justru desa akan menjadi entitas negara yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa baik di mata warga negaranya sendiri maupun negara lain.

Tabel 1

Perbedaan konsep “membangun desa” (pembangunan perdesaan) dan “desa membangun” (pembangunan desa)

Item/Isu	Membangun desa (pembangunan perdesaan)	Desa Membangun (pembangunan desa)
Pintu masuk	Perdesaan	Desa
Pendekatan	<i>Functional</i>	<i>Locus</i>
Level	<i>Rural development</i>	<i>Local development</i>
Isu dan konsep-konsep terkait	<i>Rural-urban linkage</i> , market, pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, kawasan, sektoral, dll.	Kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan lokal, pemberdayaan, dll.
Level, skala dan cakupan	Kawasan ruang dan ekonomi yang lintas desa.	Dalam jangkauan skala dan yurisdiksi desa
Skema kelembagaan	Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung alokasi dana khusus. Pusat melakukan fasilitasi, supervisi dan akselerasi.	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana dan kontrol lokal.
Pemegang kewenangan	Pemerintah daerah	Desa (pemerintah desa dan masyarakat)
Tujuan	Mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan, sekaligus membangun kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan 2. Menjadikan desa sebagai ujung depan yang dekat dengan masyarakat, serta desa yang mandiri
Peran pemerintah daerah	Merencanakan, membiayai dan melaksanakan	Fasilitasi, supervisi dan pengembangan kapasitas desa

Sumber: Perbedaan Membangun Desa dan Desa Membangun (Utoro, 2000)

1.2. Konsep Desa Membangun

Pembangunan sebagai diskursus sejatinya berkaitan dengan diskursus *developmentalisme* yang dikembangkan pada negara-negara barat. Dilihat secara mendalam, pengertian dasar pembangunan adalah istilah yang dipakai dalam berbagai konteks berbeda. Hanya saja lebih sering digunakan dalam konotasi politik dan ideologi tertentu. Ada yang menyetarakan pembangunan dengan perubahan sosial, pertumbuhan, modernisasi dan rekayasa sosial. Dalam konteks pemerintahan Orde Baru, implementasi konsep pembangunan syarat dengan menjadikan desa sebagai objek pembangunan.

Desa membangun menempatkan desa sebagai subjek pembangunan yaitu pihak yang merencanakan, melaksanakan sekaligus sebagai penerima manfaat dari pembangunan. Pemerintah yang lebih tinggi bertugas membina, memperkuat, dan mengawasi. Ini merupakan penjabaran dari prinsip subsidiaritas. Desa membangun merupakan suatu proses yang multidimensional, mencakup perubahan orientasi dan organisasi dari sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya. Tjokrowinoto (2003) memberikan deskripsi ciri-ciri pembangunan berpusat pada rakyat meliputi; 1) prakarsa dan pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri. 2) focus utamanya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan. 3) pendekatan ini mentoleransi variasi local dan karenanya sifatnya fleksibel menyesuaikan dengan kondisi local. 4) Dalam melaksanakan pembangunan pendekatan ini menekankan pada proses social learning yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar. 5) proses pembentukan jejaring antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satuan organisasi yang mandiri.

Pembangunan masyarakat desa sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah dan perkembangan pembangunan masyarakat pedesaan tidak hanya semata-mata pada sector pertanian, distribusi barang dan jasa tetapi lebih kepada spectrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan segenap anggota masyarakat sehingga mereka lebih bisa mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan terlepas dari belenggu structural yang membuat hidup sengsara. Sementara itu, pembangunan juga perlu diarahkan untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik sehingga dapat tercapai tujuan dari ruang lingkup pembangunan pedesaan yang sangat luas.

Desa membangun, idealnya menerapkan prinsip-prinsip yaitu: (1) keterbukaan, (2) partisipatif, (3) dapat dinikmati masyarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan, dan (5) berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan itu pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi pembangunan masa depan yang akan diwujudkan. Masa depan merupakan impian tentang keadaan masa depan yang lebih baik dan lebih mudah dengan tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Pembangunan pedesaan dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral, partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara serasi, selaras, dan sinergis sehingga tercapai optimalitas.

Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut meliputi: (a) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi, dan(c) stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor, termasuk desa dan kota, di setiap wilayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.

Desa membangun dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengembangkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Setiap desa perlu memanfaatkan sumber daya manusia secara luas, memanfaatkan modal fisik dan peralatan seefisien mungkin. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksanaan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Pembangunan desa yang ditujukan pada usaha peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan, menumbuhkan partisipasi aktif setiap anggota masyarakat terhadap pembangunan, dan menciptakan hubungan yang selaras antara masyarakat dengan lingkungannya. Istilah asing untuk pembangunan desa bukan hanya *rural development* (RD), melainkan juga *community development* (CD). Pada pembangunan dengan program jangka pendek bertujuan untuk mensukseskan sektor yang diprioritaskan dalam skala nasional meliputi; menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan, peningkatan produksi pangan; perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan kegiatan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan kegiatan perkoperasian, menggalakkan dan meningkatkan keluarga berencana, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Program jangka panjang pembangunan bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan desa. Secara lebih khusus pembangunan masyarakat desa memiliki makna antara lain: pembangunan masyarakat desa berarti pembangunan masyarakat tradisional menjadi manusia modern (Horton dan

Hunt, Alex Inkeles), pembangunan masyarakat desa berarti membangun swadaya masyarakat dan rasa percaya pada diri sendiri (Mukerjee dalam Bhattacharyya, 1972), pembangunan pedesaan tidak lain dari pembangunan usaha tani atau membangun pertanian (Mosher, 1974, Bertrand, 1958).

Program-program jangka pendek bertujuan untuk mensukseskan sector-sektor yang diprioritaskan dalam skala nasional seperti: menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan, peningkatan produksi pangan (pertanian); perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan kegiatan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan kegiatan perkoperasian, menggalakkan dan meningkatkan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kesehatan masyarakat.

Proses perubahan pada desa membangun yang menunjukkan terjadinya metamorpose disebut *great change*. Indikatornya meliputi; (1) division of labor, yakni bila desa itu telah menunjukkan tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok kerja yang berbeda-beda tetapi saling ada ketergantungan atau jalinan; (2) munculnya diferensiasi kepentingan dan asosiasi; (3) semakin bertambahnya hubungan yang sistemik dengan masyarakat yang lebih luas; (4) muncul dan berkembangnya fenomena birokratisasi dan impersonalisasi dalam kegiatan usaha; (5) pengalihan fungsi-fungsi ke lembaga pemerintahan dan ke bidang-bidang usaha yang menguntungkan; (6) adanya proses penyerapan gaya hidup perkotaan dan (7) adanya proses perubahan nilai-nilai (Warren, 1963).

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pedesaan diperlukan kerjasama yang erat antar daerah dalam satu wilayah dan antar wilayah. Hal ini disebabkan karena pada umumnya lokasi industri, lokasi kegiatan pertanian atau sektor-sektor lain yang menunjang/terkait cenderung terkonsentrasi hanya pada beberapa daerah administrasi yang berdekatan.

Kerjasama antar daerah dapat tumbuh secara serasi dan saling menunjang. Kerjasama antara daerah dan wilayah dapat diusahakan keseimbangan pertumbuhan antara sektor pertanian dan sektor-sektor lain baik dari segi nilai tambah maupun dari segi penyiapan tenaga kerja.

Upaya membangun masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan, partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Di negara-negara berkembang, secara demografis sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan dan memiliki tingkat pendidikan rendah. Penyusunan tata ruang desa menjadi prasyarat utama dalam memulai suatu upaya pembangunan desa. Dalam proses penyusunan tata ruang desa telah dirumuskan berbagai potensi yang ada, keunikan, kultur yang melandasi dan harapan yang ingin dicapai, sehingga wujud desa nantinya menjadi khas, seperti desa wisata, desa tambang, desa kebun, desa peternakan, desa nelayan, desa agribisnis, desa industri, desa tradisional dan lain sebagainya.

Dalam tata ruang tersebut, harus tersusun rencana infrastruktur, pemukiman, lahan usaha/budidaya berbasis sentra kemampuan daya dukung lingkungan, lokasi pendidikan, sarana pelayanan kesehatan, pasar, terminal dan ruang publik (alun alun, taman) sesuai kebutuhan dan kesepakatan masyarakat. Penetapan aktivitas dan komoditi yang akan dijadikan basis pengembangan ekonomi desa, didasarkan analisis terhadap potensi yang ada, kemampuan masyarakat pada umumnya, potensi pasar, minat dan kultur masyarakat. Pembentukan lembaga lembaga masyarakat yang akan berperan sebagai stakeholders, dan akan memberikan berbagai masukan dalam proses pembangunan desa.

Perumusan perencanaan pembangunan untuk satu masa jabatan Kepala Desa, serta program pembangunan setiap tahunnya. Perumusan harus

melibatkan harus melibatkan seluruh komponen di desa, didasarkan kepada tata ruang yang telah disusun serta didasarkan kepada kewajaran dan ketersediaan anggaran. Pembangunan pendidikan, di desa dibangun sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama dalam satu lokasi, ini dilakukan untuk mengefisienkan biaya pembangunan dan pemeliharaan sekolah, juga untuk meringankan beban orang tua murid yang besar pada komponen transport. Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan di desa perlu dibangun Puskesmas Pembantu atau sejenis, dan untuk desa yang sangat terpencil dapat didukung dengan Unit Pelayanan Kesehatan Keliling. Untuk meningkatkan sumber daya aparat desa dilakukan dengan meningkatkan program dan kegiatan yang telah berjalan melalui program pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, efektivitas program lomba desa dan peningkatan program Non Government.

Pembangunan masyarakat dengan konsep desa membangun, sebagai suatu konsep perubahan social harus diakui untuk selalu mengacu dan berpijak pada paradigma pada pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Banyak pengalaman pembangunan menunjukkan kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidak terjadi dengan sendirinya. Hal ini karena pertumbuhan produksi dan pendapatan hanya merupakan alat saja, sedangkan tujuan akhir pembangunan sebenarnya adalah manusianya sendiri menuju kemandirian.

1.3. Desa Membangun: Pengembangan Desa Wisata

Desa wisata adalah suatu kawasan perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk

dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya: keindahan desa, atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya (Priasukmana, 2001: 37). Selanjutnya, Demartoto (2009: 125) menyatakan desa wisata atau pariwisata pedesaan adalah wilayah pedesaan yang memanfaatkan unsur-unsur yang ada di masyarakat dan berfungsi sebagai atribut produk wisata, menjadi suatu rangkaian aktivitas pariwisata yang terpadu, sehingga desa tersebut mampu memenuhi segala kebutuhan perjalanan wisata, serta menyediakan berbagai fasilitas pendukungnya.

Desa Wisata adalah pengembangan suatu wilayah desa yang pada hakekatnya tidak mengubah apa yang sudah ada tetapi lebih cenderung kepada penggalian potensi desa dengan memanfaatkan kemampuan unsur-unsur yang ada dalam desa (mewakili dan dioperasikan oleh penduduk desa) yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala kecil menjadi rangkaian aktivitas pariwisata, serta mampu menyediakan dan memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik aspek daya tarik maupun sebagai fasilitas pendukungnya (Dinas Pariwisata Sleman 2007: 7).

Tujuan desa wisata adalah meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai sebagai subjek penting dalam pembangunan kepariwisataan serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan pariwisata daerah. Selain itu berupaya membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai Sapta pesona bagi tumbuh kembangnya kepariwisataan di desa dan kesejahteraan masyarakat, memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi daya Tarik desa wisata yang ada di desa.

Laporan Kajian Pengembangan Desa Wisata (2014: 2) menyatakan suatu desa yang dapat dikembangkan sebagai desa wisata harus memiliki kriteria dan faktor pendukung, yaitu:

- a. Memiliki potensi produk yang khas dan daya tarik bagi wisatawan. Potensi yang dapat menarik minat wisatawan berkunjung antara lain potensi fisik/lingkungan alam, potensi kehidupan sosial budaya yang khas.
- b. Memiliki dukungan ketersediaan sumber daya manusia lokal yang memadai untuk mendukung pengelolaan desa wisata. Karena tujuan utama pengembangan desa wisata adalah untuk memberdayakan masyarakat lokal, sehingga meningkatkan produktivitas dan ekonomi masyarakat.
- c. Faktor peluang akses terhadap akses pasar, artinya bahwa dalam mengembangkan desa wisata membutuhkan jaringan yang luas salah satunya melalui pasar atau industri pariwisata, sehingga wisatawan akan lebih banyak yang tau.
- d. Tersedia alokasi ruang untuk mengembangkan fasilitas pendukung, antara lain seperti homestay, area pelayanan umum, kesenian dan lain sebagainya. Hal tersebut untuk memungkinkan wisatawan yang ingin tinggal sementara waktu di desa wisata dan berinteraksi dengan masyarakat setempat.

Hadiwijoyo berpendapat, terdapat 2 (dua) konsep penting dalam komponen desa wisata yaitu:

- a. Akomodasi, sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
- b. Atraksi, seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti kursus, tari, bahasa, membatik, dan lain sebagainya yang spesifik.

Merujuk pada pendapat di atas, desa wisata adalah wilayah pedesaan dengan seluruh keaslian suasana pedesaan baik dari kehidupan sosial

ekonomi, budaya, dan adat istiadat yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan. Desa dapat dikatakan sebagai desa wisata apabila memiliki ciri khas yang berbeda dari segala aspek kehidupannya serta potensi yang lebih baik dengan wilayah pedesaan yang lain, ada suatu ciri khas yang ditonjolkan oleh masyarakat setempat. Sebagai contohnya, Desa Wisata Budaya memiliki ciri khas yang berbeda yaitu dalam hal kesenian dan kebudayaan yang masih terjaga dan dilestarikan oleh masyarakat lokal, antara lain batik tulis alami, kesenian tari, dan situs candi yang unik.

Sebagai upaya mengembangkan desa wisata perlu memegang prinsip pada pembangunan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya. Pemandirian masyarakat melalui desa wisata ini berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya. Proses desa membangun melalui desa wisata ini erat kaitannya dengan factor internal dan eksternal. Faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud self organizing dari masyarakat, namun kita juga perlu memberikan perhatian pada factor eksternalnya.

Desa membangun dalam upaya pengembangan desa wisata menurut Hadiwijoyo (2012: 69) bertujuan untuk:

- a. Mendukung program pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan dengan menyediakan obyek wisata alternatif
- b. Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat sekitar desa wisata
- c. Memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi penduduk desa, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga akan terjadi pemerataan ekonomi di desa

- d. Mendorong orang-orang kota yang secara ekonomi relatif lebih baik, agar senang pergi ke desa untuk berekreasi
- e. Menimbulkan rasa bangga bagi penduduk desa untuk tetap tinggal di desanya, sehingga mengurangi urbanisasi
- f. Mempercepat pembauran antara orang-orang non pribumi dengan penduduk pribumi
- g. Memperkokoh persatuan bangsa, dapat mengatasi disintegrasi.

Tujuan pengembangan desa wisata adalah menggali potensi suatu daerah untuk kepentingan masyarakat serta memberikan lapangan kerja untuk kesejahteraan hidup masyarakat desa. Desa Wisata harus memiliki arah dan tujuan untuk kepentingan perekonomian masyarakat lokal disamping juga memberdayakan potensi yang ada. Proses pengembangan desa wisata dapat terlaksana dengan baik dan dapat mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya.

Setiap desa wisata memiliki karakteristik tersendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut sehingga layak dijadikan sebagai desa wisata. Adapun karakteristiknya adalah : 1) Desa dengan lingkungan alam, unsur kriterianya meliputi keindahan alamnya, jenis sumber daya alam yang menonjol untuk kegiatan wisata, keunikan sumber daya alam, 2) Desa dengan kehidupan ekonomi/mata pencaharian melipu; Mata pencaharian penduduk yang utama yang dapat dikembangkan sebagai atraksi wisata, Kurangnya tingkat pengangguran masyarakat, Pemerataan yang berhubungan dengan hasil investasi lokal. 3) Desa dengan kehidupan adat/seni budaya meliputi; Tata cara adat sangat kental mendominasi kehidupan masyarakat, Pengelolaan kegiatan seni budaya yang berlangsung di lingkungan desa dilakukan murni oleh masyarakat, Kehidupan masyarakat sangat unik dan tradisional. 4) Desa dengan bangunan tradisional meliputi: Bangunan khas dan unik. Arsitektur lokal sangat dominan, Struktur tata ruang bersifat khas,

Pola lengkap serta material yang digunakan sangat alami menggambarkan unsur kelokalan dan keaslian, dan Interior peralatan makan dan minum menggambarkan unsur kelokalan dan keaslian (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman (2007: 10-11).

Muara pada desa wisata adalah pembangunan. Hal ini berarti pembangunan sebagai perubahan yang disengaja atau direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki ke arah yang dikehendaki. Istilah modernisasi sering diartikan identik dengan pembangunan, artinya sebagai proses penerapan pengetahuan dan teknologi modern pada berbagai segi atau bidang kehidupan masyarakat. Selain itu, ada pula yang mendefinisikan pembangunan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan perubahan sosial melalui modernisasi.

Masyarakat di sekitar wisata mempunyai peran penting untuk memberikan layanan kepada wisatawan sehingga masyarakat perlu mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan para wisatawan. Pemerintah melalui instansi terkait dapat menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat dalam bentuk bina masyarakat sadar wisata. Kajian masyarakat setempat dapat dipandang sebagai tuan rumah kunjungan wisatawan. Selain itu, dapat pula dipandang sebagai sumber daya manusia untuk pengembangan daerah wisata melalui potensinya sebagai tenaga kerja di sektor pariwisata, karena merupakan penyedia jasa yang mendukung perekonomian warga dan lingkungan sekitar pada umumnya. Lingkungan alam sekitar obyek wisata juga perlu diperhatikan dengan seksama agar tidak rusak dan tercemar. Lingkungan masyarakat dalam alam suatu obyek wisata merupakan lingkungan budaya, yang menjadi pilar penyangga kelangsungan hidup suatu masyarakat. Lingkungan budaya perlu dilestarikan sehingga tidak tercemar budaya asing dan harus ditingkatkan kualitasnya agar

memberikan kenangan yang mengesankan bagi wisatawan (Suwanto 1997: 24).

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata baik di dalam objek maupun di luar kawasan objek antara lain; jasa penginapan atau homestay, penyediaan /usaha warung makan dan minuman, penyediaan/toko souvenir/cinderamata dari desa wisata, jasa pemandu/ petunjuk jalan, fotografi, dan menjadi pengusaha wisata alam. Pengembangan desa wisata didasarkan pada salah satu sifat budaya tradisional yang lekat pada suatu desa atau sifat atraksi yang dekat dengan alam dengan pengembangan desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut. Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata.

BAB II

PARTISIPASI MASYARAKAT MENUJU DESA MEMBANGUN

2.1. Partisipasi Masyarakat Desa

Partisipasi berasal dari Bahasa Inggris “*participation*” yang diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat. Verhagen (1979) menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggungjawab, dan manfaat.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Bornby (dalam Theresia et al, 2014) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

Pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut :

- a. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
- c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
- d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Suryono (2001:124) menyatakan bahwa partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi.

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif. Masyarakat dalam hal ini melakukan keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial,

hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Slamet (dalam Suryono 2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat. Partisipasi atau peranserta pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela baik karena alasan dari dalam maupun dari luar dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan yang mencakup pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemanfaatan hasil kegiatan yang dicapai.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukkan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Supriady (2005:16) diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan

kesepian dari partisipasi masyarakat. Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, pelibatan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolok ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

2.2 Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Desa

Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses desa membangun memberikan indikasi adanya pengakuan pemerintah bahwa masyarakat bukanlah sekadar objek atau penikmat hasil pembangunan, melainkan subjek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Slamet (1985) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh tiga unsur yaitu; 1) adanya kesempatan yang diberikan

kepada masyarakat untuk berpartisipasi, 2) adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, dan 3) adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Partisipasi sebagai keterlibatan secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari kepentingan pemerintah. Partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan. Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi model baru yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna.

Slamet (2003:8) menyatakan bahwa, partisipasi ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu :

- a) Partisipasi politik (*political participation*)
- b) Partisipasi social (*social participation*)
- c) Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*)

Ketiga hal partisipasi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a) Partisipasi politik (*political participation*) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
- b) Partisipasi social (*social participation*) partisipasi ditempatkan sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan,

evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.

- c) Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*) menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum terisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik. Partisipasi dapat dijelaskan sebagai masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata.

Dusseldorp (1981) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi warga masyarakat meliputi: 1) menjadi anggota kelompok masyarakat, 2) melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok, 3) melibatkan diri pada kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain, 4) menggerakkan sumberdaya masyarakat, 5) mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, dan 6) memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat.

Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila akan dilakukan pendekatan pembangunan

dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal adalah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Bahkan pula mereka akan mempunyai pengetahuan lokal untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut.

Partisipasi bukan hanya sekadar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (acceptable) dan dianggap layak dipercaya (reliable) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula.

Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

2.3 Pentingnya Partisipasi Masyarakat Desa

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Usaha mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi.

Slamet (dalam Suryono 2001:124) menyatakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam

membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukkan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

Partisipasi masyarakat menurut Supriady (2005:16) diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan kesepian dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, melibatkan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan

sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (*acceptable*) dan dianggap layak dipercaya (*reliable*) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula.

Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

BAB III

PARTICIPATORY LEARNING AND ACTION

3.1. Pengertian *Participatory Learning and Action (PLA)*

Participatory Learning and Action (PLA) atau Pembelajaran dan Kaji Tindak secara Partisipatif merupakan “payung” dari metode-metode partisipatif yang berupa *Rapid Rural Appraisal (RRA)*, *Participatory Rapid Appraisal (PRA)*, *Participatory Action Research (PAR)* dan *Participatory Learning Method (PALM)*. Pembelajaran dan Kaji Tindak secara partisipatif ini merupakan bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai “*learning by doing*” atau belajar sambil bekerja (Chambers, 1996).

Pembelajaran PLA ini sebagai metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas proses belajar. *Participatory Learning and Action* sebagai pendekatan pembelajaran dalam praktiknya melibatkan komunitas dengan menggabungkan beberapa cara yang terus tumbuh dari metode partisipatif dan metode visual dengan teknik wawancara alami untuk memfasilitasi proses analisis dan pembelajaran kolektif.

PLA dapat digunakan dalam mengidentifikasi kebutuhan, perencanaan, pemantauan atau evaluasi proyek dan program pada masyarakat. PLA sebagai alat konsultasi yang kuat, menawarkan kesempatan untuk melampaui sekadar konsultasi dan mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam masalah dan intervensi yang membentuk kehidupan mereka. Pendekatan PLA ini telah digunakan, secara tradisional dengan mengajak masyarakat pedesaan pada negara berkembang. PLA ini telah ditemukan dan digunakan sangat efektif dalam memanfaatkan perspektif unik pada masyarakat pedesaan miskin. Selain itu, juga

membantu membuka ide masyarakat tidak hanya pada sifat dan penyebab masalah yang mempengaruhi masyarakat, tetapi juga pada solusi yang realistis. Hal ini memungkinkan masyarakat setempat untuk berbagi persepsi dan mengidentifikasi, memprioritaskan dan menilai masalah dari pengetahuan masyarakat tentang kondisi lingkungan setempat.

Pendekatan PLA menggabungkan berbagai wawasan dengan analisis dan menyediakan katalis bagi masyarakat itu sendiri untuk bertindak sesuai dengan apa yang ditemukan. Di Inggris, pendekatan PLA semakin banyak digunakan dalam berbagai kondisi kemiskinan berbasis masyarakat dan proyek regenerasi kapanpun partisipasi aktif masyarakat diprioritaskan. Dengan menggunakan metode visual dan alat analisis, PLA memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi, tanpa mengenal usia, etnis, atau kemampuan membaca. Participatory Learning and Action (PLA) merupakan pendekatan atau metode yang memungkinkan masyarakat pedesaan untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, serta membuat rencana dan tindakan nyata (Chambers, 1996).

PLA mensyaratkan adanya fasilitator yang baik, terjadinya proses saling belajar antara berbagai pihak baik masyarakat dan lembaga pemerintah dan tumbuhnya sikap perilaku yang mengkondisikan proses tersebut saling mendengarkan, saling belajar, saling menghargai, serta adanya motivasi yang kuat bahwa setiap orang bisa belajar dan berbuat. Metode PLA selalu menekankan pada usaha-usaha pihak luar untuk mendorong masyarakat yang paling miskin dan lemah untuk mengembangkan proses pembelajarannya dan mendorong daya bertindak masyarakat.

Pendekatan partisipatif yang digunakan saat ini telah berkembang pesat. Terdapat beberapa bentuk partisipasi dalam masyarakat yang berperan penting dalam masyarakat yaitu:

1. Penelitian partisipatif

Kajian partisipatif ini oleh Freire (1968), pendekatan ini menggunakan dialog dan penelitian bersama untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat dan untuk memberdayakan mereka untuk mengambil tindakan. Meskipun fokus khusus pada masyarakat yang kurang mampu dan pada tindakan politik telah membatasi penyebarannya, kontribusi kunci untuk pendekatan saat ini terletak pada pengakuan bahwa orang miskin adalah kreatif dan mampu serta harus diberdayakan, sementara orang luar memiliki peran sebagai katalis dan fasilitator.

2. Analisis agroekosistem

Analisis agroekosistem dikembangkan oleh Conway (Conway, 1987). Pendekatan ini mengacu pada sistem dan pemikiran ekologis, menggabungkan analisis sistem (produktivitas, stabilitas, keberlanjutan, kesetaraan) dengan analisis pola ruang, waktu, arus dan hubungan, nilai, dan keputusan relatif. Di antara kontribusi utama untuk pendekatan saat ini adalah penggunaan transek, pemetaan dan diagram informal dan penggunaan penilaian dan peringkat untuk menilai inovasi.

3. Antropologi terapan

Meskipun antropologi sosial konvensional lebih mengutamakan pemahaman daripada perubahan, antropologi terapan menjadi lebih dikenal pada 1980-an sebagai kegiatan yang sah dan bermanfaat, terutama dalam kemampuannya membantu para profesional pembangunan untuk lebih menghargai kekayaan dan validitas masyarakat pedesaan. Hal ini menekankan manfaat dari pengamatan dan percakapan partisipan yang tidak tergesa-gesa dan pentingnya sikap, perilaku, dan hubungan.

4. Penelitian Lapangan tentang Sistem Pertanian

Dua cabang dari disiplin ini secara bersamaan mengungkapkan di satu sisi rasionalitas petani kecil dan miskin dan di sisi lain kegiatan mereka sebagai eksperimen. Karena itu, partisipasi petani dalam penelitian pertanian menjadi fokus utama terutama dalam konteks sistem pertanian yang kompleks, beragam, dan rawan resiko.

5. Asesmen Pedesaan Secara Cepat

Pendekatan ini muncul pada akhir 1970-an, ini merupakan reaksi terhadap ketidakpuasan umum dengan bias yang melekat dalam pendekatan pembangunan pedesaan, yang cenderung menyembunyikan kemiskinan dan kekurangan dari masyarakat. Hal ini sebagai reaksi terhadap kebosanan, biaya, dan sering ketidaktepatan proses survei kuesioner konvensional. Dalam menjawab pertanyaan "Pengetahuan siapa yang diperhitungkan?" itu berusaha untuk memungkinkan orang luar untuk mendapatkan wawasan dan informasi dari masyarakat pedesaan tentang kondisi pedesaan dengan biaya yang efektif dan tepat waktu.

Istilah partisipasi memiliki arti berbeda untuk orang yang berbeda. Istilah partisipasi ini telah digunakan untuk membangun kapasitas lokal dan kemandirian. Ini telah digunakan untuk mengalihkan kekuasaan dan pengambilan keputusan dari lembaga eksternal, tetapi juga untuk membenarkan keputusan eksternal. Istilah partisipasi juga telah digunakan untuk pengumpulan data dan juga untuk analisis interaktif. Tetapi sering masyarakat berpartisipasi dalam operasi yang tidak menarik bagi mereka, atas nama partisipasi (Rahnema, 1992).

Menurut Theresia *et al* (2014) sebagai upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi akan tumbuh jika masyarakat mengetahui tentang; 1) adanya masalah yang sedang dihadapi dan

memerlukan upaya pemecahannya, 2) adanya kemampuan masyarakat sendiri untuk memecahkan masalahnya sendiri, 3) pentingnya partisipasi setiap warga masyarakat dalam pemecahan masalah untuk kegiatan desa membangun, dan 4) adanya kepercayaan dalam diri setiap warga masyarakat bahwa mereka mampu memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan desanya.

Tabel 2. Tipologi Partisipasi

Tipologi	Karakteristik
Partisipasi Pasif	Orang berpartisipasi dengan diberi tahu apa yang akan terjadi atau sudah terjadi. Ini adalah sebuah pengumuman sepihak oleh administrasi atau manajemen proyek tanpa mendengarkan tanggapan orang lain. Informasi yang dibagikan hanya milik profesional luar.
Partisipasi dalam Pemberian Informasi	Individu berpartisipasi dengan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti ekstraktif menggunakan kuesioner survei atau pendekatan serupa. Orang-orang tidak memiliki kesempatan untuk mempengaruhi proses, karena Temuan penelitian tidak dibagikan atau diperiksa untuk keakuratan.
Partisipasi melalui Konsultasi	Individu berpartisipasi dengan dikonsultasikan, dan orang eksternal mendengarkan fasilitator. Eksternal ini profesional mendefinisikan masalah dan solusi, dan dapat memodifikasinya. Proses konsultatif semacam itu tidak mengakui bagian apa pun dalam pengambilan keputusan, dan profesional tidak berkewajiban untuk mengambil keputusan.
Partisipasi untuk Insentif	Individu berpartisipasi dengan menyediakan sumber daya, misalnya tenaga kerja, dengan imbalan makanan, uang tunai atau lainnya insentif material. Banyak penelitian di ladang termasuk dalam kategori ini, karena petani menyediakan lahan tetapi tidak terlibat dalam pengalaman atau proses belajar.

	Sangat umum untuk melihat ini disebut partisipasi, namun orang tidak memiliki kepentingan dalam memperpanjang kegiatan ketika insentif akhir.
Partisipasi Fungsional	Individu berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan terkait dengan proyek, yang dapat melibatkan pengembangan atau promosi yang diprakarsai secara eksternal organisasi sosial. Keterlibatan seperti itu cenderung tidak berada pada tahap awal siklus proyek atau perencanaan, tetapi setelah keputusan besar telah dibuat. Lembaga-lembaga ini cenderung tergantung pada inisiator dan fasilitator eksternal, tetapi dapat menjadi mandiri.
Partisipasi Interaktif	Individu berpartisipasi dalam analisis bersama, yang mengarah pada rencana aksi dan pembentukan lokal baru institusi atau penguatan yang sudah ada. Ini cenderung melibatkan metodologi interdisipliner yang mencari berbagai perspektif dan memanfaatkan proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur. Kelompok-kelompok ini mengambil kendali atas keputusan lokal, dan sehingga orang memiliki kepentingan dalam mempertahankan struktur atau praktik.

3.2. Prinsip-Prinsip *Participatory Learning and Action* (PLA)

Beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam metode PLA antara lain adalah saling belajar dan berbagi pengalaman, keterlibatan semua anggota kelompok dan informasi, orang luar sebagai fasilitator, konsep triangulasi, serta optimalisasi hasil, orientasi praktis, dan keberlanjutan program (Chambers, 1996). Pendekatan PLA menjadikan masyarakat menjadi peneliti, perencana, dan pelaksana pembangunan dan bukan sekadar objek pembangunan. Penerapan pendekatan dan teknik PLA dapat memberi peluang yang lebih besar dan lebih terarah untuk melibatkan masyarakat.

Selain itu melalui pendekatan PLA akan dapat dicapai kesesuaian dan ketepatangunaan program dengan kebutuhan masyarakat sehingga keberlanjutan (*sustainability*) program dapat terjamin.

Pengembangan masyarakat dan pembangunan pedesaan sesungguhnya dapat dimulai dengan sederhana yaitu suatu proses yang berangkat dari kemampuan, kemauan, dan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi penghidupan dan menyelenggarakan kehidupannya. Selama ini pembangunan cenderung merupakan keinginan elit nasional (birokrat dan wakil rakyat) yang sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, tetapi pendekatan dan model serta penerapannya kurang tepat. Pendekatan dan metode partisipatif muncul sebagai alternatif terhadap pendekatan yang dominan tersebut. PLA merupakan salah satu alternatif pendekatan partisipatif yang merupakan respon terhadap dominasi pendekatan pembangunan model *top-down*.

Participatory learning and action (PLA) atau Pembelajaran dan Kaji Tindak secara partisipatif memiliki beberapa prinsip sebagai berikut :

- a) *Participatory learning and action* (PLA) atau Pembelajaran dan Kaji Tindak secara partisipatif merupakan proses belajar secara berkelompok yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara interaktif dalam suatu proses analisis bersama.
- b) *Multi perspective*, PLA mencerminkan beragam interpretasi pemecahan masalah yang nyata yang dilakukan oleh para pihak yang beragam dan berbeda cara penanganannya.
- c) Spesifikasi lokasi, sesuai dengan kondisi dari pihak yang terlibat.
- d) Difasilitasi oleh dan *stakeholders* (bukan anggota kelompok belajar) yang bertindak sebagai katalisator dan fasilitator dalam mengambil keputusan; dan (jika diperlukan) mereka akan meneruskannya kepada pengambilan keputusan.

- e) Pengambil perubahan, dalam arti bahwa keputusan yang diambil melalui *Participatory learning and action* (PLA) akan dijadikan acuan bagi perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

Mengacu pada prinsip-prinsip PLA di atas, keberhasilan pada desa membangun tidak selalu ditentukan tersedianya sumber dana keuangan akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh peranserta dan respons masyarakat terhadap pembangunan atau partisipasi dari warga masyarakatnya. Untuk mencapai keberhasilan partisipasi warga masyarakat, diperlukan fasilitator, kepemimpinan lokal yang cakap dan berwibawa dan diterima masyarakat yang mampu mensinergikan tradisi social budaya masyarakat (Adisasmita, 2006).

3.3. Media Participatory Learning and Action (PLA)

Media yang diperlukan dalam pelaksanaan Participatory learning and action sangatlah beragam dan terus berkembang. Para praktisi dari pendekatan tersebut terus-menerus beradaptasi dan menambah media untuk memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa media yang umum digunakan untuk pendekatan PLA dalam masyarakat:

- a. Peta

Kegiatan pemetaan sering digunakan sebagai kegiatan pengantar. Mereka mengajak komunitas untuk ikut serta dan berbicara tentang bagaimana mereka melihat daerah di mana mereka tinggal, sumber daya / fasilitas yang tersedia dan apa yang penting bagi mereka di lingkungan mereka. Mereka memungkinkan 'orang luar' untuk mulai melihat komunitas melalui mata dari masyarakat setempat.

b. Garis Waktu

Garis waktu adalah jenis diagram yang membantu mencatat perubahan dalam komunitas / rumah tangga / kehidupan anggota komunitas seiring waktu. Hal ini sebagai cara untuk mencatat pengetahuan sejarah yang penting dan tonggak sejarah dari suatu komunitas atau individu, memberikan konteks historis yang lebih luas untuk masalah yang sedang terjadi. Mereka juga dapat memungkinkan peserta untuk menggambar tren.

c. *Transect Walks*

Transect Walks adalah jenis kegiatan pemetaan, yaitu proses berjalan melintasi suatu wilayah dengan anggota komunitas / kelompok anggota masyarakat, mengamati, mengajukan pertanyaan dan mendengarkan sambil berjalan. Informasi ini kemudian disajikan secara visual dalam sketsa / diagram transek.

d. Pohon Masalah

Problem Trees atau pohon masalah adalah jenis diagram yang memungkinkan anggota masyarakat untuk melakukannya, menganalisis sebab dan akibat dari masalah tertentu, dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Dibangun di sekitar masalah / masalah fokus, penyebab masalah tersebut ditelusuri di bawah, dan efek di atas.

e. Aktivitas Pemeringkatan

Kegiatan pemeringkatan / penilaian memberikan cara bagi anggota masyarakat untuk mempertimbangkan / menilai / memprioritaskan item atau masalah baik relatif satu sama lain atau sesuai dengan kriteria.

f. Diagram Venn / Chapati

Diagram Venn adalah dua jenis diagram yang serupa yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi peran dan hubungan individu, kelompok dan individu dan hubungan di antara mereka.

Beberapa media dan alattersebut yang digunakan sebagai bagian dari pendekatan PLA. Pendekatan itu sendiri dinamis dan fleksibel tetapi didukung oleh beberapa prinsip utama meliputi: a) Peran dibalik sedemikian rupa sehingga orang lokal dipandang sebagai ahli, dan b) Anggota masyarakat sendiri yang menggambar, memetakan, pemodelan, pembuatan diagram. Fasilitator membangun hubungan, mendengarkan, bertanya dan belajar terhadap masyarakat. Namun demikian, factor yang tidak kalah pentingnya pada penerapan PLA ini adalah kemauan. Kemauan untuk berpartisipasi yang ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki warga masyarakat untuk membangun dan memperbaiki kehidupannya menurut Theresia et al (2014) meliputi; 1) sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan, 2) sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya, 3) sikap untuk selalu ingin memperbaiki hidup dan tidak cepat puas diri, 4) sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah, dan tercapainya tujuan pembangunan, dan 5) sikap kemandirian atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya.

BAB IV

PELAKSANAAN PARTICIPATORY LEARNING ACTION

4.1. Pembelajaran Participatory Learning Action

Participatory Learning and Action (PLA) adalah metodologi pendekatan pembangunan masyarakat yang mengadopsi pembelajaran masyarakat. Tokoh pengembang PLA ini adalah Robert Chambers (1996) yang menyatakan bahwa salah satu sumber atau akar PLA adalah pemikiran dari Paulo Freire tentang pendidikan kritis atau pendidikan pembebasan yang mengartikan pembelajaran masyarakat sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas hidupnya. Pada PLA ini, orang dewasa tidak butuh belajar teori yang tidak relevan dengan kehidupannya. Jadi fasilitatorlah yang bertujuan mendorong pembelajaran memiliki tantangan tertentu. Fasilitator harus melakukan sesuatu yang sangat berbeda jika mereka ingin menjadi agen perubahan pada orang dewasa.

Panduan PLA ini adalah tentang bagaimana fasilitator dapat memberikan keterampilan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Masyarakat ini kemudian dapat menerapkan apa yang mereka pelajari untuk mengubah perilaku dan sikap mereka tentang diri mereka sendiri dan orang lain, memodifikasi konteks kelembagaan tempat mereka bekerja, dan memulai proses dan prosedur yang lebih partisipatif dalam pekerjaan mereka.

Pada PLA ini penting untuk merenungkan terminologi. Orang-orang atau warga masyarakat yang bekerja dengan fasilitator adalah peserta pembelajaran masyarakat tersebut. Dalam panduan ini, menggunakan 'trainer' dan 'fasilitator' untuk menggambarkan peran yang sama, dan 'peserta' atau 'peserta pembelajaran' ketika merujuk pada orang-orang yang menyelenggarakan sesi pembelajaran/ pemberdayaan masyarakat atau

lokakarya. Tindakan Fasilitator idealnya mulai harus selalu mengarah pada pertumbuhan bagi peserta pembelajaran PLA. Belajar adalah tentang mengembangkan diri sendiri. Untuk mencapai kesuksesan, peserta warga belajar harus didorong untuk mengambil tanggung jawab atas pengalaman belajar mereka sendiri, sehingga hal itu berlanjut meskipun pelatihan atau kursus di masyarakat ini berakhir.

Di hampir setiap situasi pembelajaran, Fasilitator akan menghadapi sekelompok orang yang beragam dengan kebutuhan pelatihan yang berbeda. Pendekatan pembelajaran yang Fasilitator gunakan harus memenuhi kebutuhan yang berbeda ini. Mereka harus dipilih dengan mengingat beberapa fakta dasar tentang proses pembelajaran orang dewasa. Secara khusus, penting untuk dicatat bahwa orang belajar paling baik ketika mereka merasa mereka mengendalikan proses belajar, daripada menerima pelajaran atau menjadi subjek pengajaran. Tidak semua model pembelajaran dapat melakukan ini. Peserta belajar dengan baik ketika mereka terlibat aktif dan termotivasi. Pada metode *Participatory Learning and Action* ini, orang dewasalah yang menjadi fasilitator begitu pula pesertanya.

Tabel 4.1 Bagaimana orang dewasa belajar

Orang dewasa adalah pembelajar sukarela. Waktu terbaik adalah ketika mereka memutuskan untuk menghadiri pelatihan karena alasan tertentu. Mereka memiliki hak untuk mengetahui mengapa suatu topik atau sesi penting bagi mereka.

Orang dewasa biasanya datang dengan niat untuk belajar. Jika motivasi ini tidak didukung, mereka akan mati motivasi atau berhenti datang.

Orang dewasa memiliki pengalaman dan dapat saling membantu untuk belajar. Dorong berbagi pengalaman itu dan sesi pelatihan PLA akan menjadi lebih efektif.

Pembelajaran orang dewasa terbaik adalah dalam suasana

keterlibatan dan partisipasi aktif.

Orang dewasa belajar paling baik ketika jelas bahwa konteks pelatihan dekat dengan tugas atau pekerjaan mereka sendiri. Orang dewasa paling baik dibelajarkan dengan pendekatan dunia nyata.

4.2. Menjadi Pembelajar pada *Participatory Learning and Action*

Sebagian besar Fasilitator tidak cukup memperhatikan kapasitas belajar individu. Ini dianggap sebagai sesuatu yang orang lakukan dengan baik atau buruk dan tidak dapat berubah. Namun kemampuan untuk belajar sangat berharga dan dapat didorong oleh pelatih. Hal yang paling penting adalah kemampuan untuk belajar dari orang lain dengan tetap berpikiran terbuka. David Kolb (1984) mengemukakan bahwa ada empat jenis kemampuan yang dibutuhkan peserta didik jika ingin efektif. Mereka harus dapat: 1) melibatkan diri mereka sepenuhnya, 2) secara terbuka dan tanpa bias dalam pengalaman baru: 3) pengalaman nyata; merenungkan dan mengamati pengalaman-pengalaman ini dari banyak perspektif: 4) observasi reflektif; membuat konsep yang mengintegrasikan panggilan pengamatan mereka ke dalam teori yang logis: 5) konseptualisasi abstrak; menggunakan teori-teori ini untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah: dan 6) eksperimen aktif.

Kebanyakan orang mengembangkan gaya belajar yang menekankan beberapa kemampuan belajar daripada yang lain. Manajer yang sibuk, misalnya, biasanya kuat dalam eksperimen aktif tetapi lemah dalam keterampilan pengamatan reflektif; seorang akademisi murni mungkin memiliki keterampilan yang berlawanan; seorang penyuluh mungkin kuat dalam pengalaman nyata tetapi lemah dalam konseptualisasi abstrak. Perbedaan gaya belajar seperti itu dapat menciptakan masalah bagi pelatih,

terutama jika mereka tidak memperhatikan campuran keterampilan, sikap, dan pengalaman yang ada pada peserta.

Namun yang jelas adalah bahwa semua pembelajaran sebaiknya dilakukan melalui keterlibatan aktif. Ini menyiratkan bahwa proses belajar (atau pembelajaran) lebih penting daripada subjek yang sebenarnya. Orang dewasa memiliki masalah khusus dengan pembelajaran. Dengan bertambahnya usia, daya ingat jangka pendek kita menjadi kurang efisien dan lebih mudah terganggu. Kami merasa lebih sulit untuk menerjemahkan apa yang kami lihat atau dengar ke memori jangka panjang. Metode apa pun yang terlalu mengembangkan ingatan jangka pendek, seperti ceramah atau demonstrasi, akan menemui kegagalan.

Tabel 4.2. Kelemahan dari ceramah di kelas

- Pengetahuan dianggap hanya milik fasilitator, karena komunikasi satu arah tanpa partisipasi, umpan balik atau penguatan dari audiens.
- Diasumsikan bahwa ada kesenjangan pengetahuan antara fasilitator dan pendengar. Diasumsikan bahwa pemikiran warga belajar adalah kapal kosong yang perlu diisi dengan banyak fakta.
- Karena peserta pembelajaran adalah penerima informasi yang pasif, mereka mudah menjadi bosan atau gelisah.
- Metode ceramah menekankan pada transfer informasi dan fakta, tetapi kekuatan pesan tergantung jauh lebih dari fakta itu sendiri.
- Rentang perhatian terbatas, terutama jika kuliah disampaikan dengan suara yang monoton. Rata-rata orang langsung lupa 50% dari apa yang dia dengar.
- Terlalu sering ceramah adalah pembicaraan 'kalengan', disiapkan hanya sekali dan sering diulang.
- Fasilitator tidak memiliki cara untuk mengetahui seberapa baik peserta memahami atau mempercayai pesan jika tidak ada umpan balik yang terfokus selama atau setelah kuliah.

Semua harus dilakukan secara teratur dan terus-menerus: "Tanpa penguatan, banyak orang melupakan bagian-bagian penting dari apa yang telah mereka pelajari setelah sekitar enam bulan" (Rogers, 1989). Pembelajaran yang dirancang dengan baik mewajibkan peserta untuk terus membangun keterampilan dan pengetahuan yang dipelajari sebelumnya. Tanpa penguatan, keterampilan akan memudar.

Paradoksnya, banyak peserta pembelajaran tidak akan tahu sendiri apa yang mereka butuhkan untuk membantu mereka belajar. Mereka mungkin menolak upaya Fasilitator untuk memperkenalkan metode pembelajaran baru, meskipun ini lebih menyenangkan. Untuk mendorong peserta pembelajaran merasa nyaman dalam pengaturan pembelajaran yang Fasilitator sediakan, pertimbangkan cara terbaik untuk menarik minat berbagai jenis peserta didik yang hadir dalam sesi pembelajaran PLA. Karena peserta pembelajaran dalam metode partisipatif adalah orang dewasa, penting untuk mempertimbangkan bagaimana cara terbaik orang dewasa belajar.

Untuk mendorong pembelajaran pada peserta dewasa, dalam pelaksanaan PLA pertimbangkan hal-hal berikut:

Pastikan mereka merasa butuh, terlibat atau penting. Ini memberi mereka motivasi yang diperlukan untuk pembelajaran berlangsung;

- a. Berkomunikasilah dengan jelas program pembelajaran apa yang dibutuhkan Mereka harus yakin bahwa itu akan relevan, dan bahwa keterampilan khusus yang dipelajari akan memenuhi kebutuhan;
- b. Pastikan ada banyak latihan praktis. Ketika mereka 'melakukan', kepercayaan diri meningkat dan mereka mampu menyesuaikan apa yang mereka pelajari dengan keadaan mereka sendiri;
- c. Menghormati dan mendorong individualitas karena orang belajar dengan kecepatan yang berbeda dan memiliki gaya yang berbeda;

- d. Terus mengaitkan materi baru dengan informasi dan keterampilan yang telah mereka ketahui.

4.3. Motivasi untuk Belajar pada *Participatory Learning and Action*

Sepanjang proses pembelajaran, lokakarya atau sesi apa pun, Fasilitator harus memanfaatkan dan terus memberi motivasi para peserta. Jika tidak, semuanya akan runtuh. Elemen kunci dari motivasi adalah harga diri yang kuat pada peserta, sehingga penting untuk mencari cara membangun ini. Salah satu cara praktis untuk melakukan ini adalah meminta peserta menuliskan semua hal yang dapat mereka lakukan. Ini berbeda dengan menanyakan kepada mereka semua hal yang ingin mereka lakukan atau miliki. Menghargai apa yang sudah fasilitator lakukan dapat membangun harga diri dan motivasi.

Sekali lagi ini kembali ke perbedaan antara belajar dan mengajar. Beberapa fasilitator dan guru masih percaya bahwa hanya terpapar pada subjek sudah cukup; dan keterampilan dan pengetahuan itu 'mengalir'. Tetapi kurangnya motivasi adalah salah satu alasan utama mengapa proses pembelajaran gagal. Ada banyak alasan mengapa peserta mungkin tidak termotivasi atau kehilangan motivasi, diantaranya: mereka telah diperintahkan untuk menghadiri pembelajaran, ada beberapa yang tidak menginginkan untuk menghadiri pembelajaran; mereka tidak tahu mengapa mereka menghadiri pembelajaran; mereka sadar akan pekerjaan yang menumpuk di tempat kerja mereka, dan pikiran mereka ada di tempat lain. Gaya mengajar fasilitator tidak cukup berperan untuk melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan mereka; mereka telah 'diajarkan' sebelumnya, jadi mereka merasa sudah mengetahuinya; mereka memiliki kesalahpahaman tentang Fasilitator atau organisasi Fasilitator.

Sebagai seorang Fasilitator harus bisa menangani banyak masalah ini sebelum pembelajaran. Penting untuk memulai dengan bertanya: "Mengapa peserta menghadiri pembelajaran? Apa alasan pribadi mereka untuk datang?" Seperti ditunjukkan di atas, mereka mungkin tidak punya pilihan, dengan seseorang senior yang memerintahkan mereka untuk hadir. Jika mereka tidak dipaksa, maka ada sejumlah motif yang mungkin mereka bawa bersama mereka ke proses pembelajaran. Mereka mungkin ingin tahu tentang pembelajaran, setelah mendengar dari orang lain tentang nilainya. Mereka mungkin berharap untuk belajar keterampilan baru untuk melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik. Mereka mungkin sangat tidak puas dengan pendekatan dan prosedur saat ini, yang dikenal sebagai kegagalan. Pembelajaran ini dapat dianggap sebagai mengarah pada peluang promosi, atau setidaknya untuk peran dan tanggung jawab yang berubah. Mereka mungkin juga berharap bahwa hal itu akan mengarah pada penempatan hubungan baru dengan lembaga lain, dan karenanya menawarkan peluang kerja baru.

Motivasi dapat berubah selama pembelajaran. Fasilitator dapat mulai dengan peserta yang mencurigakan dan berakhir dengan kelompok yang sepenuhnya termotivasi. Fasilitator harus waspada terhadap perubahan-perubahan ini selama pembelajaran berlangsung (lihat tabel 4.3). Umum demoralisasi termasuk terlambat datang atau tidak hadir, kualitas pekerjaan yang menurun, dan menantang otoritas yang dipersepsikan. Tapi jangan bingung fase menyerang kelompok dengan motivasi lemah. Setiap kelompok secara alami melewati fase sulit dalam siklus hidupnya, yang bukan merupakan pembelajaran kurangnya motivasi. Berikut perlunya mendaftarkan periksa motivasi pada kondisi peserta table 4.3.

Tabel 4.3. Daftar Periksa Motivasi bagi Peserta

- Apakah Fasilitator tahu alasan yang diberikan semua peserta untuk hadir?
- Apakah mereka telah diminta untuk menyatakan tujuan pribadi mereka, yaitu apa yang mereka harapkan untuk mencapai pada akhir pembelajaran?
- Apakah Fasilitator memiliki sistem untuk umpan balik tentang motivasi selama pembelajaran?
- Apakah ada ketentuan di akhir pembelajaran untuk umpan balik tentang apakah mereka mencapai tujuan mereka?
- Apakah Fasilitator memiliki sistem untuk membimbing peserta yang motivasi atau tujuannya tidak cocok dengan Fasilitator atau kelompok?
- Apakah Fasilitator memiliki sistem untuk memantau dan mengendalikan:
 - Pada peserta yang terlambat datang?
 - Pada peserta yang pekerjaan yang buruk?
 - Pada peserta yang kurangnya perhatian?

4.4. Hambatan Komunikasi pada *Participatory Learning and Action*

Komunikasi yang baik dan pertukaran informasi yang bebas merupakan inti dari semua pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Tetapi ini bisa diancam oleh hambatan yang dibangun atau sudah ada di antara fasilitator dan peserta pembelajaran. Meskipun memilih latihan yang tepat dan metode instruksi, hambatan lain dapat mengurangi keefektifan komunikasi antara pengirim pesan dan penerima pesan. Jika fasilitator mengirim pesan, misalnya dalam sebuah pembelajaran, penting bagi fasilitator untuk mengkonfirmasi bahwa peserta yang menerima telah mengerti apa yang ingin fasilitator komunikasikan. Jika peserta tidak atau tampaknya tidak akan mengerti, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Jika Fasilitator menerima pesan dari peserta, baik itu secara verbal

atau non verbal, maka penting untuk mengkonfirmasi bahwa fasilitator telah memahami apa yang ingin mereka sampaikan.

Dalam situasi pembelajaran, fasilitator berharap untuk mendorong peserta pembelajaran untuk berubah. Tetapi kebanyakan orang menolak perubahan kecuali mereka melihat manfaatnya secara langsung. Persepsi awal dan gagasan yang terbentuk sebelumnya mempersulit kita untuk melihat dan menganalisis berbagai hal secara terbuka; pikiran kita diatur dalam satu pola pemikiran tertentu. Sebagai fasilitator, kita tidak dapat mengharapkan peserta pembelajaran untuk melepaskan ide dan perilaku mereka sendiri dengan segera. Namun, Fasilitator dapat memastikan bahwa ada sedikit hambatan untuk berkomunikasi sebanyak mungkin sehingga peserta didorong untuk berubah.

Ada banyak hambatan komunikasi dalam kelompok. Ketika seseorang mengalami masalah, dia biasanya memiliki perasaan yang kuat. Ketika terlibat dalam proses pembelajaran yang membutuhkan perubahan perilaku, banyak peserta pembelajaran menjadi defensif untuk menghindari rasa malu, terancam, rentan atau tidak kompeten. Banyak respons sebagai fasilitator, biasanya berikan dalam situasi seperti itu mungkin tampak membantu tetapi sebenarnya dapat memperparah komunikasi dan meningkatkan perasaan tekanan dan isolasi.

Tabel 4.4. Rintangan dalam Komunikasi yang Khas

Solusi atau saran :	Kami menyiratkan secara tidak langsung: "Fasilitator tidak mampu untuk mencari tahu masalahnya. Jadi lakukan dengan cara saya; perasaan Fasilitator tidak penting."
Perintah :	Memberi perintah dapat memancing kemarahan karena orang tidak diberi pilihan dan perasaan mereka belum dipertimbangkan

Ancaman :	Kami menggunakan kekuatan kami untuk memberi tahu orang-orang apa yang akan terjadi jika mereka tidak melakukannya dengan cara kami. Perasaan mereka tidak penting.
Moralisasi:	Ketika kita memberi tahu orang-orang apa yang harus atau harus mereka lakukan. Kita menghargai nilai kita sendiri lebih dari perasaan mereka.
Kritik atau cemoohan:	Kami menyangkal perasaan orang dengan mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah orang jahat dan tidak memiliki hak untuk merasakan apa yang mereka lakukan.
Pujian atau simpati:	Kami mencoba mengganti atau menutupi perasaan mereka dengan perasaan lain. Pernyataan-pernyataan ini menghindari masalah sebenarnya.
Mempertanyakan:	Dengan mencoba membuat orang berpikir secara logis, kita menyangkal perasaan mereka.

Perasaan dan emosi bisa menjadi penghambat komunikasi yang sangat kuat. Banyak emosi dikirim sebagai isyarat non-verbal, dalam pandangan mata, memegang lengan, atau bahasa tubuh. Fasilitator yang sensitif akan menangkap indikasi emosi kuat baik verbal maupun non-verbal. Ingatlah bahwa apa yang dikatakan seseorang tidak selalu berarti: cobalah memahami di balik apa yang diungkapkan.

Untuk menghindari kesalahpahaman, fasilitator harus terbuka dan eksplisit tentang apa yang ingin dicapai sesi pembelajaran dan harus mendorong pertanyaan dan komentar. Untuk menantang asumsi kita sendiri

sebagai fasilitator, adalah baik untuk mengklarifikasi keraguan yang mungkin kita miliki atau arus bawah yang kita rasakan dengan meminta umpan balik secara teratur. Jika membuat asumsi dan mengabaikan perasaan menghalangi komunikasi yang baik, maka membantu seseorang untuk mengungkapkan perasaannya akan memperbaiki hambatan tersebut. Seberapa baik Fasilitator mendengarkan? Ini tidak semudah kedengarannya. Sangat sering kita hanya mendengarkan beberapa kata pertama dan mulai membentuk pendapat sebelum kita mendengarkan akhir pernyataan dan benar-benar mendengar apa yang dikatakan orang tersebut.

Menggunakan keterampilan untuk mendengarkan adalah salah satu hal paling bermanfaat yang dapat kita lakukan. Berbagai cara untuk mencapai hal ini dan merespons secara terbuka meliputi:

- a. Mendengarkan secara pasif: tetap diam dan biarkan orang itu berbicara. Kita dapat mengkomunikasikan minat dan kepedulian kita dengan sikap non-verbal;
- b. Ucapan terima kasih: gunakan ungkapan singkat yang mengkomunikasikan pemahaman dan penerimaan kita. seperti "oh seperti itu". "mmm", "Aku mengerti";
- c. Pembuka pemikiran: alih-alih pertanyaan langsung, menggunakan ekspresi yang mengundang orang tersebut untuk memperluas atau untuk terus mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka. Misalnya: "Ceritakan tentang hal itu"; "Saya ingin mendengar lebih banyak tentang itu";
- d. Dengan mendengarkan dengan cermat umpan balik, Fasilitator dapat mengukur seberapa baik masalah yang dibahas sedang dipahami. Dengarkan yang tersirat, dengarkan ide-ide baru atau perspektif yang tidak biasa, dengarkan ketegangan atau kebingungan yang mendasarinya, dan yang paling penting, jangan biarkan emosi

- Fasilitator masuk. Saat dihadapkan dengan kritik, kita cenderung menjadi defensif. Berhati-hatilah untuk tidak menghalangi ekspresi bebas peserta dengan mengirimkan pesan negatif atau non-verbal yang negatif, seperti menunjukkan ketidaksabaran atau keraguan. Fasilitator akan lebih mampu menghadapi situasi jika Fasilitator mencoba memahami perspektif yang berlawanan. Juga, jangan bereaksi berlebihan: apa yang dikatakan satu peserta mungkin merupakan pandangan minoritas, jadi jangan kehilangan peserta lain dengan merespons panjang lebar.
- e. Nada suara fasilitator sama pentingnya dengan kata-kata yang fasilitator gunakan. Dengan memproyeksikan suara Fasilitator dan menunjukkan antusiasme dan minat pada subjek Fasilitator, Fasilitator dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Namun, Fasilitator harus sadar bahwa, seperti bahasa tubuh, nada suara dapat mengungkapkan lebih dari yang kita harapkan, termasuk emosi atau ketegangan negatif.

4.5. Penerapan Pembelajaran *Participatory Learning and Action*

Banyak masalah yang muncul dalam kelompok pada akhirnya terkait dengan kepribadian dan keterampilan fasilitator. Rogers mengatakannya seperti ini: "Berpikir kembali ke sekolah saya sendiri dan ke pembelajaran yang saya temui sejak itu, semua guru berprestasi berbagai gaya yang antusias, terbuka, santai saat mengajar." Untuk menjadi fasilitator yang baik membutuhkan waktu dan pengalaman, dan belajar sambil mempraktekkan adalah cara terbaik. Fasilitator yang paling efektif memiliki sejumlah karakteristik utama (Rogers, 1989).

Beberapa karakteristik fasilitator ini dapat disesuaikan dengan kepribadian. Kepribadian yang lain dapat dipelajari atau ditingkatkan

melalui pengalaman dan latihan. Masih ada kepribadian yang bisa dikembangkan yakni:

- a. Kepribadian yang hangat, dengan kemampuan untuk menunjukkan persetujuan dan penerimaan pembelajaran;
- b. Keterampilan sosial, dengan kemampuan untuk menyatukan kelompok dan mengendalikannya tanpa merusaknya;
- c. Cara mengajar yang menghasilkan dan menggunakan gagasan dan keterampilan peserta;
- d. Kemampuan pengorganisasian, sehingga sumber daya dipesan dan pengaturan logistik ditangani dengan lancar;
- e. Keterampilan memperhatikan dan menyelesaikan masalah peserta;
- f. Antusiasme terhadap subjek dan kapasitas untuk menyampaikannya dengan cara yang menarik;
- g. Fleksibilitas dalam menanggapi perubahan kebutuhan peserta;
- h. Pengetahuan tentang materi pelajaran.

Beberapa karakteristik ini dapat disesuaikan dengan kepribadian fasilitator. Keterampilan yang lain dapat dikembangkan dengan menggunakan latihan khusus yang terstruktur untuk menyediakan beberapa kondisi untuk belajar oleh peserta. Namun yang paling penting, pembelajaran mengharuskan Fasilitator untuk bersikap kritis terhadap kinerja di setiap tahap sesi atau lokakarya. Daripada bertanya pada diri sendiri apakah Fasilitator bisa melakukan lebih baik, tanyakan apa dan kapan Fasilitator bisa melakukan lebih baik. Kritik konstruktif dari kolega atau rekan kerja merupakan tambahan penting untuk refleksi diri. Ketika melakukan ini, ingatlah bahwa Fasilitator tidak akan pernah dapat sepenuhnya memuaskan setiap peserta. Jika Fasilitator berhasil mendorong pembelajaran di antara mayoritas peserta, maka Fasilitator telah melakukan pekerjaan dengan baik.

Hal inilah merupakan keterampilan fasilitator dalam melaksanakan pembelajaran PLA.

4.6. Dari Manipulasi Ke Fasilitasi dalam *Participatory Learning and Action*

Cara Fasilitator berkomunikasi dengan peserta juga akan bergantung pada apakah Fasilitator memanipulasi kelompok atau memfasilitasinya. Ada perbedaan besar antara manipulasi dan fasilitasi. Manipulasi berpusat pada fasilitator. Fasilitator bertanggung jawab dan semua orang tahu itu. Fasilitator menjadi sedikit belajar. Fasilitasi berpusat pada peserta didik. Fasilitator membantu orang lain untuk belajar, dan Fasilitator juga akan belajar.

Sebagai seorang fasilitator, Fasilitator berada dalam posisi otoritas relatif, terutama selama tahap awal pembelajaran. Membimbing kelompok tanpa memaksakan atau mengendalikan terlalu banyak lebih sulit daripada kedengarannya. Tidak ada yang lebih menggoda bagi fasilitator yang gugup selain untuk tetap mengontrol dengan ketat prosesnya, dan untuk memutuskan apa, kapan, bagaimana, di mana, mengapa, dan dengan siapa sesuatu harus dilakukan. Pendekatan pembelajaran yang kaku dan top-down dapat menjadi efisien dan meyakinkan bagi fasilitator yang cemas, tetapi jarang mengarah pada pembelajaran nyata dan pembangunan kelompok yang kuat.

Pendekatan yang berfokus pada peserta didik untuk pembelajaran mendorong kreativitas dan refleksi oleh peserta, yang mengarah pada perubahan sikap dan kesadaran. Fasilitasi adalah pendekatan yang lebih disukai untuk pembelajaran dalam metode partisipatif. Tetapi manipulasi tidak semestinya dilihat sebagai sepenuhnya salah. Fasilitator dapat menggabungkan fasilitasi dengan manipulasi acara pembelajaran, karena, dalam banyak kasus, hanya Fasilitator yang tahu apa tujuan akhir

pembelajaran dari latihan tertentu dan bagaimana cara terbaik mereka dapat dicapai. Kadang-kadang Fasilitator harus membuat situasi atau meminta reaksi untuk memastikan bahwa peserta memahami titik pembelajaran tertentu. Ada tempat untuk ini dalam sesi pembelajaran yang bagus, asalkan tujuannya adalah untuk mendorong atau merangsang pembelajaran, dan bukan untuk mempertahankan kekuasaan atas kelompok.

Dalam kebanyakan kasus, fasilitator adalah tokoh dominan di awal acara pembelajaran dan sebagian besar peserta pembelajaran akan mengharapkan bimbingan. Secara umum, peserta pembelajaran tidak terbiasa dengan konsep, prinsip, dan metode yang akan dibahas. Mereka mungkin khawatir, skeptis atau bahkan tidak yakin mengapa mereka menghadiri pembelajaran. Fasilitator senior mungkin tidak berada dalam lingkungan belajar formal selama bertahun-tahun dan mungkin cemas tentang bagaimana mereka akan dilihat oleh rekan-rekan mereka yang lebih junior. Pada saat yang sama, para peserta junior mungkin merasa enggan berbicara secara terbuka karena takut berhadapan langsung dengan atasan mereka.

Pada tahap awal, Fasilitator harus mengarahkan pembelajaran untuk membuat peserta pembelajaran merasa lebih nyaman dan menciptakan kondisi yang tepat untuk belajar. Ada banyak hal yang dapat Fasilitator lakukan untuk mengurangi ketegangan dan mendorong partisipasi aktif. Hal ini juga merupakan periode ketika ceramah dapat digunakan untuk efek yang baik untuk menempatkan pembelajaran dalam konteks kelembagaan dan metodologi yang tepat, dan mengatur pembelajaran untuk kegiatan yang lebih aktif.

Ketika peserta pembelajaran menjadi lebih nyaman satu sama lain dan dengan proses keseluruhan, kekompakan kelompok akan meningkat dan mereka akan mulai menegaskan mereka sendiri selama pembelajaran. Fasilitator kemudian dapat menyerahkan kontrol kepada peserta. Pergeseran

kontrol ini kadang-kadang disebut sebagai penurunan fasilitator, atau bahkan kematian fasilitator. Ungkapan ini dimaksudkan untuk menggambarkan suatu proses di mana fasilitator perlahan-lahan memudar dari pembelajaran utama ketika peserta menerima tanggung jawab yang lebih besar dan memulai berbagai kegiatan secara mandiri.

Fasilitator dapat mendorong peserta pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan tepat waktu, menyarankan berbagai latihan kelompok, dan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang dinamis, seperti kelompok *buzz* dan sesi *brainstorming*. Karena anggota kelompok telah tumbuh lebih percaya diri dan independen, ini adalah saat yang tepat untuk mengusulkan permainan peran, studi kasus terperinci dan kegiatan lain yang membutuhkan partisipasi aktif dalam jumlah yang lebih besar dan pengambilan risiko.

Ketika pembelajaran berakhir, Fasilitator perlu menegaskan kembali otoritas atas peserta sekali lagi. Beberapa arahan mungkin diperlukan untuk mengeluarkan poin-poin pembelajaran utama dan mendorong kelompok untuk beralih dari tindakan ke refleksi. Bersikap terbuka dengan kelompok dan beri tahu mereka tentang perubahan peran ini. Dengan dorongan ini, para peserta pembelajaran akan mengalihkan perhatian mereka dari kegiatan mereka saat ini dan menuju masa depan, ketika mereka harus menerapkan apa yang telah mereka pelajari ke pengaturan kerja mereka sendiri. Perubahan fokus dari publik ke pribadi ini kadang-kadang disebut sebagai kemunduran kelompok, yang merupakan bagian penting dari setiap kegiatan pembelajaran PLA.

Sesi pembelajaran terbaik dalam metode partisipasi dengan PLA hanya dapat memberikan kesan parsial tentang bagaimana peserta akan tampil dalam situasi dunia nyata. Setelah itu berakhir, para peserta harus kembali ke rutinitas pekerjaan mereka dan menyesuaikan keterampilan dan

pengetahuan yang mereka peroleh selama pembelajaran agar sesuai dengan situasi khusus mereka.

4.7. Pentingnya Umpan Balik dalam Pelaksanaan *Participatory Learning and Action*

Fasilitator umumnya merasa sulit untuk bersikap terbuka dan kritis tentang perilaku mereka sendiri. Karenanya, memberikan umpan balik yang konstruktif atau mendorong refleksi diri adalah keterampilan yang sangat penting. Jenny Rogers (1989) menggambarkan tantangan: "Mengajar orang dewasa sangat rumit dengan kesulitan mengkritik yang setara. Tidak memberikan kuantitas atau kualitas umpan balik yang tepat adalah salah satu alasan utama mengapa pembelajaran orang dewasa gagal. Ada dua hal penyebabnya yaitu memberikannya dengan cara yang salah dan tidak cukup memberi.

Jika Fasilitator tidak memberitahu peserta kapan mereka melakukan sesuatu dengan baik, maka mereka tidak akan dapat memperkuat hal-hal baik yang mereka lakukan. Banyak orang dewasa merasa sulit untuk mengenali bahwa mereka telah melakukan kesalahan, dan bahkan lebih sulit untuk melepaskannya. Mereka bersembunyi di balik alasan defensif, menghindari konfrontasi dengan pengalaman masa lalu dan kesalahpahaman, sehingga menghambat kemajuan mereka sendiri.

Sebagai seorang fasilitator dalam Pembelajaran PLA harus memandu refleksi diri dan segera memberikan umpan balik, untuk mengatasi beberapa kesalahan dari masa lalu. Ada lima aturan sederhana untuk memberikan umpan balik pada pembelajaran PLA:

- a. Berikan umpan balik sesegera mungkin. Jangan menunggu sampai kesalahan atau kesuksesan terulang.

- b. Batasi komentar hanya pada dua atau tiga aspek kinerja baik atau buruk. Ada batasan berapa banyak yang bisa kita serap pada satu waktu.
- c. Jangan segera memperbaiki kesalahan diri Fasilitator. Selalu ada godaan besar untuk membantu secara langsung dan menunjukkan. Tetapi bantuan semacam itu hanya menciptakan ketergantungan. Hal yang paling sulit bagi seorang fasilitator adalah tetap diam dan membiarkan peserta belajar dengan melakukannya sendiri. Mungkin butuh waktu lebih lama tetapi dampak pembelajaran akan lebih besar.
- d. Berikan pujian sebelum memberikan komentar negatif. Betapapun buruk kinerjanya, pasti ada sesuatu yang bisa Fasilitator puji. Membangun harga diri peserta.
- e. Mengkritik kinerja, bukan orangnya. Setiap kali Fasilitator menawarkan umpan balik, pastikan itu mendorong peserta untuk menindaklanjutinya.
- f. Refleksi diri adalah komponen penting dari setiap umpan balik yang mendorong pembelajaran. Dengan meminta para peserta mereka untuk merefleksikan secara kritis kinerja mereka sendiri, mereka akan menyadari dengan lebih baik bahwa mereka pada akhirnya bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri.

Namun, banyak orang dewasa belum belajar untuk melakukan ini dan merasa sulit untuk melihat, menerima, dan mengakui di depan umum bahwa kinerja mereka dapat meningkat. Ada berbagai cara untuk membuat ini lebih mudah, Dua diantaranya adalah:

- a. setelah latihan atau sesi, minta peserta untuk merenungkan dan menuliskan pelajaran utama yang telah mereka pelajari dari

kinerja mereka sendiri. Tanyakan: "Bagaimana Fasilitator akan melakukan hal-hal yang berbeda sekarang?";

- b. berpasangan atau bertiga, minta peserta untuk saling memberikan komentar pada kinerja keseluruhan mereka.

Fasilitasi yang baik mengarah pada perasaan kelompok dan empati yang baik antara peserta dan fasilitator. Peserta mungkin kehilangan konsentrasi atau melamun, tetapi sebagai fasilitator harus cukup terkonsentrasi untuk mengikuti setiap ide, suasana pembelajaran dan intervensi.

BAB V

TAHAPAN PARTICIPATORY LEARNING AND ACTION (PLA)

5.1. Persiapan Dasar

Pada tahapan Participatory Learning and Action, persiapan dasar sangat penting untuk diperhatikan. Hal pertama untuk memulai adalah persiapan dengan diri fasilitator sendiri. Menjadi seorang fasilitator tidaklah mudah, dan penting untuk mengetahui batasan tugas ini. Memperjelas tentang posisi dan tanggung jawab Fasilitator sejak dini dalam persiapan pembelajaran akan membantu mencegah interpretasi yang tidak pantas dari peran fasilitator seperti pada Tabel 5.1

. Tabel 5.1 Tanggung Jawab Fasilitator

Penting untuk mengesampingkan peran Fasilitator. Kecuali jika kelompok memahami peran Fasilitator, mereka mungkin akan memperhatikan Fasilitator sebagai otoritas dan tidak akan melihat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Terus refleksikan kembali ke kelompok kebutuhan mereka untuk mengambil tanggung jawab untuk belajar.

Ingatlah bahwa Fasilitator tidak dapat berharap untuk memenuhi kebutuhan emosional Fasilitator sendiri saat bekerja. Jangan tergoda untuk menggunakan kekuatan yang didelegasikan kepada Fasilitator oleh peserta untuk memenuhi kebutuhan Fasilitator sendiri, seperti meminta perhatian, rasa hormat, atau berteman.

Menjadi fasilitator tidak berarti Fasilitator memenuhi syarat untuk menjadi psikoterapis, baik di tingkat kelompok atau individu. Berhati-hatilah ketika

peserta menjangkau Fasilitator, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kebutuhan emosional mereka.

Penting bagi kelompok memahami apa yang Fasilitator lakukan dengan mereka: apa tujuan Fasilitator, bagaimana Fasilitator berharap untuk memenuhi kebutuhan mereka, apa yang Fasilitator bisa dan tidak bisa berikan kepada mereka, dan bagaimana Fasilitator akan melakukannya. Merupakan hak kelompok untuk meminta pertanggungjawaban Fasilitator atas apa yang Fasilitator lakukan dengan mereka.

5.2. Tujuan Pembelajaran PLA

Sebelum Fasilitator memulai pembelajaran, fasilitator harus mengetahui dengan jelas tujuan dari pembelajarannya. Mengapa Fasilitator akan melakukan pembelajaran? Siapa yang diminta pembelajaran? Apa konten utama yang ingin Fasilitator komunikasikan dalam pembelajaran? Ada enam tujuan umum diantaranya:

- a. Untuk Mengubah Perilaku
- b. Untuk Membujuk
- c. Untuk menginformasikan
- d. Untuk Merangsang Pemikiran
- e. Untuk menghibur
- f. Untuk Memotivasi dalam Bertindak

Selain tujuan keseluruhan ini, Fasilitator perlu merumuskan tujuan khusus untuk pembelajaran, berdasarkan materi pembelajaran. Menuliskannya dalam satu kalimat akan membantu untuk memilih bahan dan akan menjernihkan pikiran Fasilitator dari topik yang tidak relevan.

Tujuan dari semua pembelajaran adalah untuk membangun keterampilan dan mendorong perubahan perilaku dan sikap pada peserta pembelajaran. Jadi penting bahwa tujuan khusus ini berhubungan untuk

sesuatu yang dapat diukur atau dievaluasi. Biasanya ada dua macam tujuan itu dapat diidentifikasi untuk pembelajaran. Pertama, menggambarkan tujuan umum menggunakan kata-kata seperti: memahami, menghargai, mengetahui dan mengenali. Merumuskan tujuan dengan cara ini berpengaruh tinggi pada pembelajaran berorientasi proses. Namun, ketika sasaran dibingkai dengan cara ini tidak mudah untuk menilai kinerja peserta. Bagaimana Fasilitator bisa tahu ketika peserta pembelajaran mencapai tingkat pemahaman yang diinginkan atau dapat menghargai suatu masalah? Fasilitator harus mengidentifikasi lebih banyak cara konkret untuk dapat mengevaluasi dampak dari pembelajaran.

Tujuan kedua lebih spesifik, sering kali berhubungan dengan keterampilan konkret yang dimiliki peserta. Tanyakan pada diri Fasilitator apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh peserta pembelajaran. Jika memungkinkan, menggunakan kata-kata seperti: membuat, menulis, merencanakan, mengidentifikasi, membandingkan, menggambar, memecahkan, dan mengukur.

Tujuan yang mengatakan "peserta pembelajaran akan memahami prinsip-prinsip dasar pembelajaran. Hal ini penting, tetapi tujuan tidak jelas. Bandingkan dengan: "pada hasil dari pembelajaran para peserta akan dapat merencanakan penggunaan metode partisipatif mereka sendiri dalam metode kerja lapangan". Ini dapat dinilai dan dievaluasi dengan lebih mudah oleh orang dari luar pembelajaran.

5.3. Mengenali Partisipan

Selanjutnya, pikirkan tentang partisipan pembelajaran. Tidak ada program pembelajaran harus dilanjutkan sampai Fasilitator mengetahui dengan jelas siapa yang akan dibelajarkan. Fasilitator perlu mencari tahu:

- a. Berapa banyak orang yang akan hadir?

- b. Mengapa mereka hadir; apakah itu pilihan mereka sendiri atau apakah atasan memerintahkan mereka untuk hadir?
- c. Apa harapan dan ekspektasi mereka hadir?
- d. Apa ketakutan dan kekhawatiran yang dihadapi mereka?
- e. Apa rentang pengalaman, disiplin ilmu, usia, jenis kelamin, status yang mungkin diwakili?
- f. Pengetahuan awal apa yang mungkin mereka miliki tentang materi pembelajaran?

Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu Fasilitator menentukan jenis program yang akan Fasilitator siapkan dan materi pembelajaran dan alat bantu pembelajaran yang akan Fasilitator pilih. Menjawab pertanyaan semacam itu akan membantu Fasilitator merancang sesi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan yang diantisipasi peserta.

5.4. Pilihan Lokasi dan Ruang

Meskipun Fasilitator mungkin tidak dapat melakukan apa pun terkait dengan tempat di mana pembelajaran akan diadakan atau waktu hari atau tahun itu direncanakan, Fasilitator harus mengetahui bagaimana ini mempengaruhi kemampuan peserta Fasilitator untuk belajar. Jika mungkin, kunjungi lokasi pembelajaran sebelum peserta akan tiba dan mengatur materi Fasilitator. Periksa apakah ruangan akan sesuai dengan jenis sesi yang telah Fasilitator rencanakan. Fasilitator mungkin perlu menyesuaikan campuran atau urutan metode pembelajaran untuk mencocokkan situasi. Misalnya, jika Fasilitator ingin melakukan permainan peran periksa ada tidaknya ruang terbuka dan di dalam ruangan, maka Fasilitator punya waktu untuk menemukan area lain yang cocok.

Cobalah untuk mengidentifikasi sumber potensial gangguan di dalam ruangan, baik untuk diri sendiri dan peserta pembelajaran. Fasilitator

harus berjalan di sekitar ruangan sebelum sesi dimulai dan duduk di berbagai kursi untuk memeriksa potensi gangguan. Jika Fasilitator menemukan gangguan serius atau hambatan yang mungkin mengganggu pembelajaran, maka ini saatnya untuk memperbaikinya.

5.5. Pengaturan Kursi

Pengaturan tempat duduk memiliki pengaruh besar pada sesi pembelajaran ini. Meskipun ini sangat bervariasi, ada enam jenis dalam pengaturan tempat duduk: 1. Barisan meja dan / atau kursi; 2. Bentuk U berongga; 3. Perjamuan atau gaya tulang ikan; 4. Meja konferensi; 5. Lingkaran kursi; 6. Meja Trio. Setiap pengaturan memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu. Secara umum, semakin banyak pekerjaan kelompok yang Fasilitator rencanakan, semakin baik menggunakan gaya jamuan atau tulang ikan.

5.6. Waktu Sesi Pembelajaran

Panjang sesi pembelajaran akan memiliki dampak penting pada konsentrasi peserta pembelajaran PLA. Orang tidak berkonsentrasi dengan baik untuk jangka waktu lama jika hanya ada sedikit variasi dalam gaya presentasi. Jika tidak ada partisipasi aktif peserta, Fasilitator harus sepenuhnya merencanakan presentasi. Setelah 20 menit, Fasilitator mungkin akan kehilangan perhatian beberapa partisipan. Fasilitator dapat mengurangi monoton dalam presentasi dengan materi, visual, latihan, cerita, lelucon, atau istirahat. Jika Fasilitator berencana untuk menggunakan alat bantu visual, berikan waktu yang cukup.

5.7. Rangkaian Kegiatan dan Isi Sesi Pembelajaran

Penting untuk menyusun setiap sesi pembelajaran dengan cermat. Mulailah dengan memikirkan peserta pembelajaran lagi:

- a. Berapa banyak yang sudah mereka ketahui?
- b. Apa yang perlu mereka pelajari?
- c. Berapa banyak waktu yang Fasilitator miliki untuk menyampaikan materi?

Sesi pembelajaran selanjutnya harus disusun pada poin-poin utama yang Fasilitator ketahui pada akhir sesi pembelajaran. Meskipun mungkin tampak tidak perlu bagi Fasilitator, selalu ulangi inti materi, apakah itu presentasi atau latihan. Pengulangan memperkuat memori. Jika Fasilitator mencoba mengkomunikasikan lima hal utama pada kelompok, maka cobalah menyimpan yang paling penting yang terakhir. Mulailah dengan menangkap minat kelompok, dan kemudian rasakan apa yang akan terjadi. Kirimkan pesan terperinci di bagian utama presentasi dan susun ke poin yang paling penting. Kemudian rangkum semuanya dengan menyatakan tujuan dan poin utama.

Berikan banyak waktu untuk persiapan catatan dan bahannya. Aturan praktis yang aman adalah memungkinkan dua kali lipat waktu presentasi untuk persiapan. Tetapi jika Fasilitator mempresentasikan topik untuk pertama kalinya, mungkin butuh waktu lebih lama. Jangan lupa untuk merencanakan anekdot dan lelucon sebagai bagian dari presentasi. Seorang fasilitator yang baik membuat lelucon atau komentar yang tampaknya tidak didengar tetapi kemungkinan telah disiapkan. Mereka mungkin telah mengatakan hal yang sama beberapa kali sebelumnya, tetapi lelucon atau cerita yang terencana dapat terdengar spontan dan dapat memperkuat poin pembelajaran.

5.8. Metode Pembelajaran

Banyak metode pembelajaran yang dapat digunakan selama pembelajaran PLA. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain, meskipun pembelajaran masih banyak digunakan. Untuk pembelajaran yang menekankan partisipasi aktif dan dialog terbuka, penting bahwa fasilitator menggunakan gaya pembelajaran yang konsisten dengan nilai-nilai partisipasi.

▪ **Kegiatan**

Pembelajaran dapat digunakan untuk kelompok dengan berjumlah berapapun. Untuk kelompok dalam jumlah yang sangat besar, mereka adalah metode pembelajaran yang paling umum. Fasilitator memegang kendali penuh atas sesi pembelajaran dan biasanya dapat memprediksi konten dan waktu secara akurat. Fasilitator untuk memperkenalkan materi pembelajaran baru atau menyajikan ringkasan atau ikhtisar kepada para peserta pembelajaran. Pada metode partisipatif dengan PLA, beberapa sesi pembelajaran diperlukan.

Masalah dengan pembelajaran sudah diketahui. Namun sebagian besar dari kita sebagai fasilitator perlu memberi pembelajaran dari waktu ke waktu. Untuk menghindari terus menerus berbicara dan berharap peserta tidak hanya mendengarkan tetapi juga menyerap. Secara khusus batasi pembelajaran hingga 15-20 menit, dan pisahkan dengan sesi singkat dan latihan yang dipilih untuk mengilustrasikan poin pembelajaran utama. Dengan cara ini, kecepatan pembelajaran dan gaya dominan perlu diubah.

▪ **Kelompok Buzz**

Metode pembelajaran PLA lainnya adalah kelompok buzz. Selama sesi pembelajaran yang lebih lama, kelompok pleno dapat membaginya menjadi sub-kelompok untuk membahas satu atau dua pertanyaan atau masalah

tertentu. Ruangan segera dipenuhi dengan keramaian ketika setiap sub-kelompok 'Buzz' dalam diskusi. Jika sesuai, setelah diskusi satu anggota dari setiap kelompok dapat melaporkan pendapatnya kembali ke pleno. Kelompok Buzz dapat berpasangan, bertiga, atau lebih tergantung pada aktivitas. Anggota kelompok berpaling pada kelompok lainnya untuk cepat, atau membentuk kelompok yang lebih besar dari tiga atau lebih. Ini memungkinkan hampir semua orang mengekspresikan pendapat. Sementara mereka 'buzzing', para peserta dapat bertukar ide dan memanfaatkan pengalaman kolektif mereka yang luas. Ini mungkin menyediakan kebutuhan, kebutuhan akan pemimpin atau fasilitator dalam setiap sub-kelompok, dan kebutuhan untuk mengatur meja dan kursi untuk diskusi yang cepat dan mudah. Khususnya, umpan balik mungkin membutuhkan waktu. Salah satu cara untuk mempersingkat ini adalah dengan mendorong peserta untuk mengungkapkan saran dan gagasan utama dalam pleno secara acak. Cara lain untuk mengatur umpan balik adalah dengan membuat satu kelompok mempresentasikan ide-ide mereka dengan kelompok lain yang hanya menyumbangkan ide-ide baru, menghindari pengulangan.

▪ **Brainstorming dan Mengumpulkan Ide**

Metode pembelajaran PLA lainnya adalah brainstorming. Tujuan dari sesi brainstorming adalah untuk menemukan ide dan respons baru dengan sangat cepat. Ini adalah cara yang sangat baik untuk mendapatkan ide-ide cemerlang. Ini berbeda dari diskusi kelompok buzz karena fokusnya adalah pada menghasilkan ide sebanyak mungkin tanpa menilai mereka. Dalam teknik ini, semua ide diberi kepercayaan yang sama. Peserta didorong untuk membiarkan ide mengalir dengan bebas, membangun dan meningkatkan dari ide-ide sebelumnya.

▪ **Bermain Peran**

Dalam permainan peran, peserta menggunakan pengalaman mereka sendiri untuk memainkan situasi kehidupan nyata. Ketika dilakukan dengan baik, permainan peran meningkatkan kepercayaan diri peserta, memberi mereka kesempatan untuk memahami atau bahkan merasakan empati terhadap sudut pandang atau peran orang lain, dan biasanya diakhiri dengan jawaban, solusi, atau pedoman praktis. Permainan peran berguna untuk mengeksplorasi dan meningkatkan teknik wawancara dan memeriksa kerumitan dan potensi konflik dalam pertemuan kelompok. Mereka membantu peserta untuk mengkonsolidasikan pelajaran yang berbeda dalam satu lingkungan dan juga merupakan penyemangat yang baik.

▪ **Studi Kasus**

Studi kasus ini melibatkan presentasi dan analisis dari suatu kejadian atau skenario yang telah terjadi atau dapat terjadi. Ada dua jenis studi kasus: presentasi singkat atau deskripsi situasi; latihan simulasi yang lebih lama.

Dalam studi kasus singkat, fasilitator memilih contoh relevansi dengan peserta pembelajaran. Dalam pembelajaran dengan metode partisipatif PLA, contoh kasus semacam itu sangat berguna bagi peserta untuk mempelajari berbagai metode analisis diagram dan memahami bagaimana mereka dapat diterapkan dalam urutan di lapangan. Namun, mereka membutuhkan persiapan yang cukup, harus diuji secara menyeluruh dan juga memakan waktu.

▪ **Menggunakan Catatan Dan Aids Visual**

Fasilitator yang sangat berpengalaman biasanya akan membutuhkan beberapa catatan. Ini terbaik dibuat dalam bentuk poin kunci atau topik yang diatur dalam urutan presentasi, dan direncanakan seputar penggunaan

berbagai alat bantu visual. Banyak pembicara menggunakan kartu kecil di mana mereka menulis poin-poin penting. Jika Fasilitator ingin menyampaikan dokumen yang panjang, maka buat salinannya dan bagikan kepada para peserta. Jangan membacanya ke kelompok karena ini menyebabkan situasi membosankan. Hanya baca dari naskah jika Fasilitator ingin membacakan kutipan.

▪ **Fasilitator Sebagai Pelaku**

Gerak tubuh dan bahasa tubuh Fasilitator, dapat menguasai kata-kata disampaikan. Berikut adalah beberapa saran:

- a. Lihatlah pada peserta. Fasilitator idealnya jangan menatap catatan atau layar. Lakukan kontak mata dengan seluruh peserta. Sambil melihat, Fasilitator juga dapat menilai tingkat minat dari reaksi para peserta.
- b. Tersenyumlah - bahkan jika Fasilitator gugup atau khawatir. Ini akan membuat peserta lebih nyaman dan, percaya atau tidak, itu juga akan merilekskan pita suara Fasilitator.
- c. Hindari menempatkan penghalang antara Fasilitator dan peserta pembelajaran. Jangan terlalu lama duduk atau berada di sebuah meja di bagian depan. Lengan atau kaki yang bersilang juga merupakan penghalang simbolis. Bersikaplah terbuka dalam postur Fasilitator, terutama ketika peserta memberikan umpan balik kepada Fasilitator.
- d. Hindari gerakan tubuh yang mengganggu. Jangan lambaikan tangan, jangan memasukkan tangan ke saku, mengenakan gelang yang berisik, bermain pena, memainkan rambut. Peserta akan fokus pada gerakan gugup ini daripada mendengarkan pesan Fasilitator.

5.9. Setelah Fasilitator Selesai

Melakukan sesi pembelajaran dengan metode partisipatif PLA sering melelahkan bagi fasilitator. Jika Fasilitator baru berlatih, maka Fasilitator akan terkejut dan kaget karena betapa lelahnya Fasilitator pada akhirnya dalam menyelesaikan pembelajaran. Untuk itu, pastikan Fasilitator memiliki ruang dan waktu untuk beristirahat sejenak.

Selain itu, jangan mengatur pembelajaran kembali ke belakang. Segera setelah pembelajaran sebagai waktu yang kritis untuk belajar dari pengalaman, meskipun Fasilitator akan lelah. Jika Fasilitator menunggu, Fasilitator akan melupakan banyak poin pembelajaran. Fasilitator dapat belajar melalui refleksi diri atau dengan meminta komentar dari para peserta.

Kebiasaan yang sangat baik untuk membuat catatan tentang kinerja Fasilitator sesegera mungkin, sehingga Fasilitator dapat belajar dari diri sendiri dan meningkatkan kualitas pembelajaran untuk waktu berikutnya. Analisis poin baik dan buruk dengan meninjau setiap sesi secara menyeluruh. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab adalah: Bagaimana itu bisa dilakukan lebih baik lain kali? Seberapa akurat pencatatan waktunya? Apakah Fasilitator dapat mempertahankan minat peserta pembelajaran? Fokus secara khusus pada titik lemah kinerja Fasilitator. Dari kesalahanlah kita bisa belajar paling banyak.

Ingatlah bahwa hanya Fasilitator dan sekelompok orang tertentu (biasanya penyelenggara) yang akan memiliki kesempatan untuk membaca evaluasi tertulis setelah selesai. Karena itu, selain meminta peserta pembelajaran untuk menyelesaikan evaluasi formal, Fasilitator mungkin ingin meluangkan waktu untuk diskusi pleno informal untuk menerima komentar tentang segala aspek pembelajaran. Ini memberi kesempatan pada peserta pelatihan untuk mengekspresikan pandangannya, apakah positif atau negatif, sehingga peserta lain dapat mendengarnya. Ini tidak perlu lebih dari 20 menit, tetapi

disarankan untuk menyisakan waktu untuk evaluasi rentang-bebas. Berikut table 5.5 sebagai perenungannya.

Tabel 5.5 Program Indikatif untuk Pembelajaran bagi Fasilitator

Hari ke-1	Pendaftaran dan Pengantar, Harapan dan Pengalaman, Tinjauan Pembelajaran: Komponen Pembelajaran PLA, Tinjauan Pembelajaran PLA Sebelumnya, Merancang Sesi Pembelajaran tentang Dinamika Kelompok dan Membangun Tim
Hari ke-2	Merancang Sesi Pembelajaran tentang Metode PLA Mempersiapkan dan Melakukan Kerja Lapangan Dokumentasi dan tindak lanjut Aplikasi dan keterbatasan di Masa Mendatang Umpan balik dan evaluasi Kunjungan desa untuk membuat pengaturan untuk kerja lapangan
Hari ke-3	Dinamika Kelompok dan Sesi Pengembangan Tim: <ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan dan Ice-Breakers; Pemberian motivasi; Sikap dan Perilaku; Analisis dan Refleksi; Monitoring dan Umpan Balik Sesi Metode Utama: <ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan Umum PLA; Wawancara Semi-Terstruktur; Pemetaan dan Transeks walk; Penilaian Matriks dan pairwise ranking; seasonality analysis dan historical trends; Diagram (sistem, dampak, dll); Analisis Kelembagaan (Venns, networks, dll) Peran dan Tanggung Jawab Persiapan dan Implementasi Kerja Lapangan:

	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Periksa, Kontrak Tim, dan Logistik; Mulai; biarkan berlangsung; Rapat Desa <p>Kegiatan Pasca Kerja Lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi dan Penyebaran; Tindak lanjut di Desa; Refleksi: Mempersiapkan Masa Depan; Evaluasi
Selama lapangan	<p>di</p> <p>Tinjauan Kinerja Tim Fasilitator</p> <p>Membahas Dinamika Tim dan Proses</p> <p>Perencanaan Hari berikutnya</p>
Setelah selesai	<p>Rencana Aksi Trainer/Fasilitator</p> <p>Catatan Proses Trainer/Fasilitator</p> <p>Diperlukan Ulasan Dukungan Organisasi</p>

BAB VI

MULTILITERASI PADA MASYARAKAT

6.1. Literasi

Literasi adalah alat yang sangat diperlukan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial dan ekonomi, yang akan mengarah kepada pembangunan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan. Dalam LIFE (Yulaelawati, 2010: 32) literasi merupakan memberdayakan dan membangun masyarakat dan membantu terwujudnya pelaksanaan hak asasi manusia yang adil.

Pendidikan literasi menyediakan dasar yang kuat untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkesinambungan dalam mencapai masyarakat yang demokratis dan stabil. Multiliterasi menjadi dasar untuk menegakkan hak asasi manusia, hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dasar, penyelesaian konflik, kecukupan gizi, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Ibu yang melek aksara dapat membuat keputusan tentang tanggung jawab dalam hal mempengaruhi keluarga, anak-anak, dan mereka sendiri, seperti praktik-praktik kesehatan, pendapatan rumah tangga, pendidikan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Para petani yang melek aksara bisa lebih produktif dan terbuka untuk pembelajaran lebih lanjut.

Literasi merupakan langkah pertama dan utama bagi banyak bentuk pembelajaran. Selanjutnya masyarakat melanjutkannya menuju multiliterasi. Jika dirancang dan disampaikan dengan baik, literasi menjadi alat yang sangat kuat untuk memberdayakan setiap anggota masyarakat dan pembangunan sosial. Kekuatan literasi dapat memperbaiki semua aspek kehidupan. Kurangnya kompetensi literasi dalam membaca, menulis, dan

berhitung akan menghambat pembangunan baik anggota masyarakat secara pribadi maupun masyarakat secara keseluruhan.

Filosofi literasi ideologis ini secara jelas memberikan perhatian pada bentuk literasi dan budaya lokal. Filosofi dari model literasi ideologis bahwa pendidikan literasi fungsional perlu dipikirkan untuk memastikan bahwa pemberantasan buta aksara harus relevan dan sesuai dengan pandangan hidup dan budaya masyarakatnya. Literasi memiliki tiga makna, pertama secara sederhana adalah kemampuan membaca dan menulis. Kedua, literasi bermakna pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Ketiga, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Dari makna literasi tersebut Nampak bahwa literasi tidak hanya terkait dengan membaca saja. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Unesco mengenai literasi.

Unesco menjelaskan bahwa literasi adalah seperangkat keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks di mana keterampilan yang dimaksud diperoleh, dari siapa keterampilan tersebut diperoleh dan bagaimana cara memperolehnya. Menurut UNESCO, pemahaman seseorang mengenai literasi ini akan dipengaruhi oleh kompetensi bidang akademik, konteks nasional, institusi, nilai-nilai budaya serta pengalaman. Literasi itu sendiri terdiri dari beberapa jenis. Dalam tulisan ini literasi dasar yang diacu adalah konsep literasi dasar yang digunakan oleh Kemdikbud dalam gerakan literasi nasional (gln.kemdikbud.go.id) ada enam jenis literasi; literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya dan kewargaan.

Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis

untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial.

Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk (a) bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari; (b) bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb.) untuk mengambil keputusan.

Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains.

Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.

Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan (a) pemahaman tentang konsep dan risiko, (b) keterampilan, dan (c) motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.

Literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat.

Dari sinilah muncul pendidikan literasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pendapat di atas diperkuat oleh Beynham (2008) yang menyatakan bahwa pada dasarnya literasi itu bersifat ideologis. Dengan demikian, literasi itu tidak netral semuanya bergantung pada keputusan sebagai sesuatu yang tidak netral sehingga pendidikan literasi fungsional harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi literasi tersebut.

Keberaksaraan dari definisi UNESCO (2003) mengenai literacy “*Literacy is as a continuum of learning that enables individuals to develop their knowledge and potential, pursue and achieve their goals, and participate fully in society*”. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa keberaksaraan merupakan kontinum pembelajaran sehingga individu mampu mengembangkan pengetahuan dan potensi dirinya, mengejar dan mencapai tujuan yang ingin diraihinya, dan berpartisipasi sepenuhnya dalam kegiatan masyarakat. Dalam artikel berjudul *Pedagogy of Multiliteracy: A Design Social Future* menemukan tiga realitas yang mengubah dari pendidikan literasi menuju multiliterasi. Realitas tersebut tidak hanya berlaku di negara-negara maju saja, namun bagi negara berkembang seperti negara Indonesia. Realitas perubahan menuju multiliterasi bagi masyarakat pedesaan tersebut meliputi kompleksitas pekerjaan masyarakat, kehidupan personal yang akhirnya menjadi alasan kuat mengapa masyarakat pedesaan juga membutuhkan pendidikan multiliterasi.

6.2. Multiliterasi pada Masyarakat

Multiliterasi pada dasarnya merupakan pengembangan konsep pendidikan literasi yang telah lama dimaknai tunggal oleh masyarakat. Walau demikian, sebenarnya masyarakat telah mempraktikkan konsep pendidikan literasi di lingkungan mereka masing-masing. Selanjutnya, masyarakat melakukan praktik pendidikan multiliterasi karena telah menyadari bahwa realitas masyarakat kini telah berkembang pesat dibandingkan dengan dahulu. Pendidikan multiliterasi dibutuhkan masyarakat pada saat ini untuk membentuk masyarakat yang mandiri.

Ziegler dan Davis (2008) menulis artikel *Rural adult literacy in community context: from the margin to the mainstream* menguraikan tentang kondisi literasi orang dewasa pedesaan dalam konteks masyarakat. Kondisi ekonomi, peluang pendidikan, dan sumber daya masyarakat pedesaan jauh tertinggal dari masyarakat perkotaan. Untuk menghadapi kondisi tersebut diperlukan kesempatan belajar yang inovatif sebagai strategi dalam pengembangan masyarakat melalui multiliterasi orang dewasa.

Pengembangan pendidikan multiliterasi yang mengacu pada kemandirian masyarakat, merupakan tekanan khusus yang seringkali menjadi patokan dan prinsip dasarnya. Oleh karena itu, pendidikan multiliterasi yang dikembangkan akan lebih tepat apabila berbasis partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat dari tujuan yang ingin dicapai selalu disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang pada masyarakat. Mengacu pada hal tersebut, maka pendidikan multiliterasi berbasis PLA lebih banyak menekankan pada kebutuhan belajar warga masyarakat pedesaan dan pada sisi lain juga menekankan pada pengembangan motivasi, sikap modern, keterampilan vokasional, dan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada pada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat pedesaan diharapkan mempunyai sejumlah kemampuan yang kemudian hari

dapat dijadikan modal untuk mengembangkan kehidupannya baik melalui usaha secara mandiri sehingga memperoleh keuntungan yang lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya.

a. Keberdayaan Desa Wisata Jojogan

Desa Jojogan merupakan salah satu desa wisata di Kecamatan Kejajar dengan ketinggian 2.011 meter dari permukaan laut, berada pada jalur wisata Dieng dengan jarak 1 Km dari Kawasan Wisata Dieng. Desa ini merupakan desa dengan jalur potensi wisata ekonomi dan jalur potensi pariwisata di Kabupaten Wonosobo. Desa Jojogan ini memiliki potensi wisata Telaga Warna dan Pengilon yang dikelola oleh BKSDA sebagai sumber pertumbuhan ekonomi desa dan masyarakat.

Secara umum, sebagian besar wilayah di Kecamatan Kejajar berada di wilayah dataran tinggi Dieng yang berada pada ketinggian 1.328-2.121 mdpl (dengan menggunakan referensi dari citra SRTM). Suhu udara di wilayah Kecamatan Kejajar berkisar antara 14-23°C dengan kondisi topografi dan suhu udara tersebut maka sebagian besar wilayah di Kecamatan Kejajar memiliki potensi untuk pengembangan tanaman hortikultura, palawija, dan perkebunan.



Gambar 1. Gerbang Masuk Desa Jojogan

Jojogan berasal dari kata *njujug* (bahasa Jawa), yang berarti singgah. Sebutan *singgah* berasal dari para pedagang dan para ulama serta wiku yang berkunjung ke Dieng pada abad ke-8, karena pada waktu itu Dieng adalah tempat peradaban kebudayaan nusantara yang terjadi karena proses civilisasi yang terus menerus. Dari proses peradaban itu, akhirnya Dieng menjadi sebuah sistem peradaban yang besar sekaligus menjadi cikal bakal berdirinya Wangsa Mataram Kuno (Sanjaya dan Syailendra) yang mencapai puncaknya pada abad 8-9 M. Banyak yang menceritakan bahwa Desa Jojogan sudah ada sejak abad 9 Masehi sebagai tempat persinggahan untuk mempersiapkan perlengkapan ritual di Dieng dan tidak sedikit yang menginap di Jojogan sebelum acara digelar.

Telaga Warna dan telaga Pengilon dulunya merupakan milik Mbah Iskak yang dijadikan Hutan Konservasi oleh Negara seluas 35,90 ha, termasuk lahan pertanian di sekitar Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Namun, akhirnya diresmikan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 740/kpts/Um/1/1978 tanggal 30 Nopember 1978, dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.359/Menhut/II/2004 tanggal 1 oktober 2004. Dengan berkembangnya jaman sekitar tahun 1930an penduduk desa banyak yang mengikuti jejak para pedagang, banyak warga yang menjadi pedagang diantaranya kembangpitrem, sehingga ekonomi masyarakat mulai meningkat. Setelah beberapa dekade penduduk desa mulai memanfaatkan program pemerintah melalui kegiatan peningkatan pertanian dengan program Bimas dan Inmas.

Ekonomi masyarakat mulai berkembang, namun peningkatan ekonomi masyarakat dapat dirasakan, perubahan pola makan sehari-hari yang biasanya sisa gilingan jagung atau gilingan ketela pohon berubah banyak yang memanfaatkan gandum dan bugur (beras coklat kasar). Dengan meningkatnya peradaban Islam mulai berkembang di Desa

Jojogan menjadi lebih maju kesadaran masyarakat dan kepedulian masyarakat meningkat, ekonomi mulai tertata pola pertaniannya banyak mengikuti para pedagang yang singgah dan tinggal di Desa Jojogan.

Desa Jojogan mengikrarkan diri menjadi desa entrepreneurship, dimana desa memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Bertani merupakan sumber pendapatan utama. Tahun 2012 banyak penduduk yang mulai melakukan usaha kepariwisataan sehingga pada tahun 2020 ini diharapkan peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata akan berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Jojogan secara umum, serta dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Desa Jojogan.



Gambar 2. Desa Entrepreneur

Desa Jojogan merupakan desa yang berada tepat dibawah lembah Dieng, sehingga kontur tanah yang menurun banyak dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Mayoritas pertanian yang ada di wilayah Desa Jojogan adalah kentang, wortel, dan sebagian ditanami teh sehingga warga desa dapat membuat teh secara tradisional yang dinilai mampu menghasilkan teh dengan citarasa dan aroma yang khas dataran tinggi Dieng. Hal ini kemudian dimanfaatkan sebagai sambilan oleh ibu-ibu

Desa Jojogan untuk selanjutnya di jual di pasar atau dititipkan di warung-warung kampung sekitarnya.

Selain menjadi desa yang kaya akan pertanian dan wisata, Desa Jojogan juga memiliki banyak fasilitas umum di dalamnya, seperti Gedung Balai Desa yang digunakan sebagai tempat administrasi segala kepentingan desa. Desa Jojogan juga dilengkapi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) yang berguna sebagai pusat kegiatan pemberian pelayanan kesehatan paripurna yang lebih dekat, relatif lebih murah dengan mutu yang terjamin.

Desa ini juga memiliki banyak sarana antara lain: lapangan badminton yang selain dipakai untuk badminton juga berfungsi sebagai gedung serbaguna desa yang dipakai setiap desa memiliki acara, baik acara pentas, acara donor darah, maupun yang lainnya yang perlu mengumpulkan seluruh warga desa. Selain itu Desa Jojogan juga memiliki lapangan bola yang tak kalah luas dengan lapangan badminton, lapangan bola ini biasa dipakai untuk berbagai acara perlombaan dan upacara dalam rangka HUT RI pada tanggal 17 Agustus.

Mayoritas ibu-ibu Desa Jojogan pada saat pagi hari bekerja sebagai petani sedangkan pada siang dan sorenya bekerja menjual oleh-oleh khas Dieng di tempat pariwisata, oleh karena itu dengan adanya kelompok bermain dan penitipan anak Al-Madani sangat membantu ibu-ibu dalam menitipkan anaknya pada saat sedang bekerja. Selain tempat penitipan anak (TPA) Desa Jojogan juga dilengkapi dengan beragam tempat pembelajaran diantaranya taman kanak-kanak RA Masyitoh Al-Ansor, SDN Jojogan, MI Ma'arif NU, dan TPQ untuk anak-anak.

b. Keberdayaan Desa Wisata Tanon, Ngrawan.

Desa Wisata Tanon, berada di kaki Gunung Telomoyo, Desa Ngrawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Diperlukan waktu sekitar satu setengah jam perjalanan dari Kota Semarang untuk sampai ke desa ini. Sebagai sebuah desa yang berada pada ketinggian, karena berada di lereng pegunungan Telomoyo, memiliki hawa yang sangat sejuk, jauh dari polusi, dekat dengan pusat penghasil sayur mayur, memiliki potensi alam yang sangat menarik dan jauh dari kesemrawutan dan kebisingan.

Desa menari di dusun Tanon merupakan salah satu desa wisata yang cukup terkenal di Kabupaten Semarang. Desa wisata ini sudah dikunjungi oleh berbagai wisatawan baik lokal maupun mancanegara, seperti Singapura, Filipina, dan Jerman. Di desa wisata menari ini para pengunjung diberikan suguhan berupa kearifan lokal masyarakat setempat, mulai dari kesenian yang dimiliki, kebudayaan, termasuk keseharian masyarakat. Penggagas Desa menari mengatakan bahwa ide membuat desa wisata ini adalah karena memang dusun Tanon memiliki potensi yang dapat digali menjadi Desa wisata. Kecintaan pada tempat kelahiran membuat pria yang akrab disapa Kang Tris ini memanfaatkan apa yang dimiliki oleh desa.

Sebagian besar masyarakat adalah petani dan peternak, sehingga pengunjung dikenalkan dengan kegiatan tari secara langsung. Semua dusun di Desa Ngrawan sebenarnya memiliki potensi yang bisa dikembangkan, namun baru dimulai dari dusun yang siap, yaitu dusun Tanon. Masyarakat hidup rukun dan masih memelihara budaya gotong royong. Masyarakat Tanon berkembang dalam rumpun keluarga dari keturunan Ki Tanuwijoyo yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan peternak. Namun demikian, di Dusun Tanon Desa Ngrawan

banyak menyimpan potensi yang jika dieksplorasi akan menjadi potensi yang bisa menjadi potensi kekayaan lokal terutama dalam menjaga tata cara tradisi leluhurnya.

Dusun Tanon adalah salah satu dusun yang masuk dalam wilayah Desa Ngrawan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah. Terletak di bawah kaki Gunung Telomoyo yang di huni oleh 37 kepala keluarga dan 157 jiwa dengan menawarkan suasana alam pedesaan yang masih jauh dari kebisingan dan hiruk pikuk kehidupan sosial modern yang serba semrawut. Letak Desa Ngrawan tidak jauh dari pusat-pusat kota, misalnya dari Kota Magelang 33,3 Km, dari Jogjakarta 76,28 Km, dari Solo 50 Km, dari Semarang 58 Km, sedangkan dari Salatiga 11,7 Km. Sehingga dari sisi aksesibilitasnya mudah terjangkau, dan bisa ditempuh paling lama 2 jam dari Jogjakarta.



Gambar 3. Karawitan Desa Tanon

Masyarakat hidup rukun dan masih memelihara budaya gotong royong. Masyarakat Tanon berkembang dalam rumpun keluarga dari

keturunan Ki Tanuwijoyo yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan peternak. Namun demikian, di Dusun Tanon Desa Ngrawan banyak menyimpan potensi yang jika dieksplorasi akan menjadi potensi yang bisa menjadi potensi kekayaan lokal terutama dalam menjaga tata cara tradisi leluhurnya.



Gambar 4. Tarian Selamat Datang *berupa Tari Warok* dari bocah-bocah seniman Tanon

Awalnya Dusun Tanon adalah desa biasa saja, tak ada istimewanya dibandingkan dengan desa lain di Jawa Tengah. Seorang pemuda yang baru lulus kuliah di Semarang, memutuskan kembali ke desanya, Tanon. Ia ingin memajukan desanya yang terletak di kaki Gunung Telomoyo itu. Pemuda bernama Trisno itu adalah pemuda pertama yang menjadi sarjana di desanya. Ia lulus menjadi sarjana Psikologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Trisno merupakan salah satu penerima apresiasi Semangat Astra Terpadu Untuk Indonesia (SATU) Awards tahun 2015.

Dulunya penduduk di kampung kelahirannya di Dusun Tanon, Desa Ngrawan Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, dikenal tidak berpendidikan dan miskin. Bahkan, banyak orangtua dari desa tetangga yang melarang anaknya menikah dengan warga dusun tersebut. Desa Ngrawan masih memegang tradisi kuat sejak zaman dulu kala, yaitu berekspresi melalui kesenian. Walaupun mata pencaharian petani dan peternak, warganya konsisten mengikuti kegiatan karawitan dan ketoprak. Itulah yang dijual kang Trisno kepada pengunjung sebagai brand, Desa Menari.

Saat ini Dewita Tanon dengan brand image “Desa Menari” menyiapkan untuk paket “Tour Plus Education” dan “Home Stay Komunitas” dengan suguhan yang dapat dipilih oleh mereka yang berminat berkunjung : 1) Belajar Kesenian rakyat dari Krido Budi Utomo 2) Belajar proses pemeliharaan, pemerahan dan pemrosesan susu menjadi industry kreatif, 3) Belajar kerajinan anyaman, 4) Belajar pembuatan “sawut Teloroso”, 5) Belajar membuat dan memaknai “Pamongan Andum Roso”, 6) Belajar permainan tradisional, 7) Outbound Ndeso, dan 8) Relaksasi mental.

c. Implementasi Multiliterasi di Desa Wisata

Penyelenggaraan multiliterasi secara keseluruhan ditujukan pada masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan meningkatkan sosial ekonomi. Literasi dan budaya baca saat ini gencar dilakukan di masyarakat agar masyarakat memiliki budaya literasi dalam kehidupan kesehariannya. Pelaksanaan multiliterasi dilaksanakan disesuaikan dengan waktu luang mereka, karena pada jadwal belajar yang telah ditetapkan menyesuaikan warga masyarakat sehingga dengan kondisi ini secara kontinyu pihak pengelola dan fasilitator berusaha menyesuaikan kondisi warga masyarakat.

Peran fasilitator dalam multiliterasi ini berbeda dengan guru di sekolah formal, karena kondisi warga masyarakat orang dewasa di masyarakat yang berbeda dengan peserta didik di sekolah. Peran fasilitator sebagai fasilitator yang membantu dan berusaha mempermudah warga masyarakat untuk belajar sehingga fasilitator sebagai fasilitator lebih berfungsi sebagai sumber belajar. Tugas fasilitator ini dimulai dengan menelusuri latar belakang warga masyarakat, mengidentifikasi kemampuan literasi warga masyarakat dalam kompetensi literasi yang terdiri atas membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara.

Multiliterasi sebelum menggunakan Participatory Learning and Action diperoleh informasi meliputi: 1) Pada tahap perencanaan pembelajaran, fasilitator tidak melakukan analisis kebutuhan sebagai awal menyusun rencana pembelajaran sehingga rencana pembelajaran tidak mengacu pada kebutuhan warga masyarakat. 2) Penentuan materi sangat tergantung pada fasilitator akibatnya materi pembelajaran yang dibelajarkan tidak sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran pendidikan literasi ini, pembelajaran literasi merujuk pada kisi-kisi yang telah disusun pemerintah mengenai multiliterasi. 3) Materi pembelajaran pada pendidikan literasi meliputi membaca, menulis, dan berhitung disertai dengan keterampilan fungsional. Selama ini bahan belajar masih tetap merujuk bahan dari pemerintah, belum dapat membuat sendiri bahan belajar sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat. Dan 4) fasilitator melakukan literasi, mulai dengan pembelajaran, membimbing warga masyarakat, dan membuat keterampilan yang dibutuhkan.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sangat tergantung pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh fasilitator. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran diawali dengan persiapan awal dengan mengadakan sosialisasi dan pemberian informasi tentang materi

yang akan dipelajari. Kegiatan pembelajaran literasi ini meliputi membaca, menulis, berhitung, berbicara, dan mendengarkan.

Pada literasi membaca, kegiatan pembelajaran melalui tahapan sebagai berikut: 1) fasilitator menyediakan cerita yang berkaitan dengan warga masyarakat, 2) warga masyarakat membaca cerita, 3) fasilitator menilai kemampuan warga masyarakat dalam membaca khususnya penggunaan tfasilitator baca. Kegiatan literasi menulis, pelaksanaan pembelajaran melalui tahapan sebagai berikut: 1) fasilitator meminta warga masyarakat menulis surat, menulis blangko, 2) fasilitator menilai kemampuan menulis warga masyarakat melalui penilaian hasil tulisannya. Pelaksanaan pembelajaran literasi berhitung melalui tahapan sebagai berikut: 1) fasilitator membuat soal yang berkaitan berhitung, dengan menggunakan empat simbol hitung (pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian), 2) soal dibuat dalam bentuk soal cerita, 3) fasilitator meminta warga masyarakat mengerjakan, 4) fasilitator menilai kemampuan berhitung warga masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran literasi mendengarkan melalui tahap: 1) fasilitator menyiapkan bacaan, 2) fasilitator membacakan wacana yang telah disiapkan, 3) warga masyarakat mendengarkan/menyimak yang dibacakan oleh fasilitator, 4) fasilitator bertanya kepada warga masyarakat tentang isi bacaan, 5) warga masyarakat menceritakan kembali isi bacaan, 6) fasilitator menilai kemampuan mendengarkan berdasarkan kemampuan menceritakan kembali isi wacana yang dibacakan oleh fasilitator. Pelaksanaan pembelajaran literasi berbicara dengan tahapan sebagai berikut: 1) fasilitator menunjukkan gambar kepada warga masyarakat, 2) fasilitator bertanya kepada warga masyarakat pesan yang terdapat pada gambar, 3) fasilitator meminta warga masyarakat menceritakan isi pesan yang terdapat pada gambar yang ditunjukkan, 4) warga masyarakat menceritakan isi pesan yang terdapat dalam gambar yang ditunjukkan

sebagaimana yang diminta fasilitator, 5) fasilitator menilai kemampuan berbicara warga masyarakat melalui kemampuan bercerita.

Penilaian literasi warga masyarakat berkenaan dengan kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung selanjutnya ditafsirkan secara kualitatif. Pada proses penetapan dan penyusunan instrumen penilaian, seluruh instrumen penilaian ditentukan oleh fasilitator, mulai dari instrumen dan alat penilaian kemampuan warga masyarakat menulis, membaca, mendengarkan, berbicara dan berhitung. Penilaian yang dilakukan secara langsung oleh fasilitator kepada warga masyarakat. Penilaian yang dilakukan ada dua tahap yaitu, penilaian kehadiran dan praktek kemampuan warga masyarakat dalam literasi, bagi warga yang belum mampu maka pengelola maupun fasilitator langsung memberikan motivasi kepada warga masyarakat untuk terus semangat, terkadang pengelola dan fasilitator langsung mengunjungi warga ke rumah-rumah bagi warga masyarakat.

Penyelenggaraan multiliterasi yang diselenggarakan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pengelola melakukan pendataan warga masyarakat yang telah lulus literasi dasar atau telah memiliki surat keterangan melek aksara (sukma) selanjutnya menyesuaikan kesediaan warga untuk menjadi warga masyarakat pada multiliterasi tingkat lanjutan. 2) Merumuskan tujuan diselenggarakannya program pendidikan literasi dengan mengadakan koordinasi dengan pengelola, fasilitator dan warga masyarakat. 3) Pihak pengelola menyusun jadwal kegiatan pendidikan literasi. Pelaksanaan kegiatan literasi dilaksanakan menyesuaikan kesepakatan kelompok belajar. Jadwal disusun secara fleksibel dan menyesuaikan dengan kesempatan dan kesiapan belajar warga masyarakat dan fasilitator.

Kendala umum berkenaan dengan pemetaan jadwal adalah tingkat kehadiran warga masyarakat. 4) Sarana yang digunakan dalam proses

multiliterasi selama ini masih memanfaatkan fasilitas yang ada. Tempat kegiatan program pendidikan literasi adalah balai desa, rumah penduduk, ruang taman bacaan masyarakat. 5) Pihak pengelola melakukan proses penyusunan struktur pengelola program pendidikan literasi dengan melibatkan langsung semua pihak.

Uraian tugas penyelenggara multiliterasi berdasarkan struktur pengelola program dan menyusun format kurikulum literasi. Tindak lanjut dari pihak pengelola tentunya hanya sebatas melakukan monitoring dan terus memberi motivasi terhadap warga yang pernah mengikuti pembelajaran untuk terus mengembangkan kemampuan. Penilaian program pendidikan literasi pada masyarakat dilaksanakan langsung oleh pengelola program bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.

d. Desain *Participatory Learning and Action* (PLA) pada Multiliterasi untuk Penguatan Ekonomi Kreatif dan konservasi budaya desa wisata di Jawa Tengah

Pengembangan desain *Participatory Learning and Action* pada multiliterasi untuk penguatan ekonomi kreatif dan konservasi budaya desa wisata ini mengacu pada peran serta masyarakat. Hal ini terlihat dari tujuan yang ingin dicapai selalu disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang pada masyarakat. Mengacu pada hal tersebut, maka multiliterasi lebih banyak menekankan pada kebutuhan belajar warga masyarakat pedesaan dan pada sisi lain juga menekankan pada pengembangan motivasi, sikap modern, keterampilan vokasional, dan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada pada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat pedesaan diharapkan mempunyai sejumlah kemampuan yang kemudian hari dapat dijadikan modal untuk mengembangkan kehidupannya baik melalui usaha secara mandiri

sehingga memperoleh keuntungan yang lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya.

Partisipasi menjadi komponen penting untuk pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan, sehingga masyarakat yang terlibat dapat lebih memiliki percaya diri, harga diri, dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh perempuan yang difasilitasi dengan kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang difasilitasi tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan masyarakat pedesaan itu sendiri.

Konservasi budaya yang dikembangkan dalam penelitian mengacu pada nilai-nilai konservasi Universitas Negeri Semarang merupakan salah satu perguruan tinggi yang menobatkan diri sebagai Universitas Konservasi. Konservasi sendiri memiliki arti yaitu usaha melindungi dan melestarikan nilai budaya dan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dalam penelitian ini multiliterasi berbasis nilai-nilai konservasi meliputi inspiratif, humanis, peduli, inovatif, sportif, kreatif, jujur, dan adil. Nilai-nilai konservasi inilah yang akan dikembangkan dengan multiliterasi pada perempuan di desa wisata.

Seseorang telah berliterasi apabila ia mampu mengkomunikasikan suatu informasi yang ia dapatkan berdasarkan alur pemikiran yang jelas yakni tidak menerima ataupun meyakini informasi secara mentah. Dalam mengolah suatu informasi dari berbagai disiplin ilmu diperlukan pemikiran logis misalnya dengan cara mengkritisi, menganalisis, ataupun mengevaluasi. Konsep multiliterasi yang telah diintegrasikan dengan keterampilan abad ke 21 tentunya memberikan suatu kondisi belajar yang berbeda dengan sebelumnya.

Pembelajaran multiliterasi melibatkan banyak model dan strategi belajar sehingga senantiasa melibatkan masyarakat untuk senantiasa aktif dalam mengajukan pertanyaan ataupun membuat simpulan sendiri. Melalui pembelajaran multiliterasi yang bersifat menantang diharapkan masyarakat desa mampu memiliki rasa percaya diri, cerdas, komunikatif, berani dan berkarakter. Salah satu model multiliterasi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran multiliterasi dengan *Participatory Learning and Action*.

Participatory learning and action (PLA) memiliki beberapa prinsip sebagai berikut :

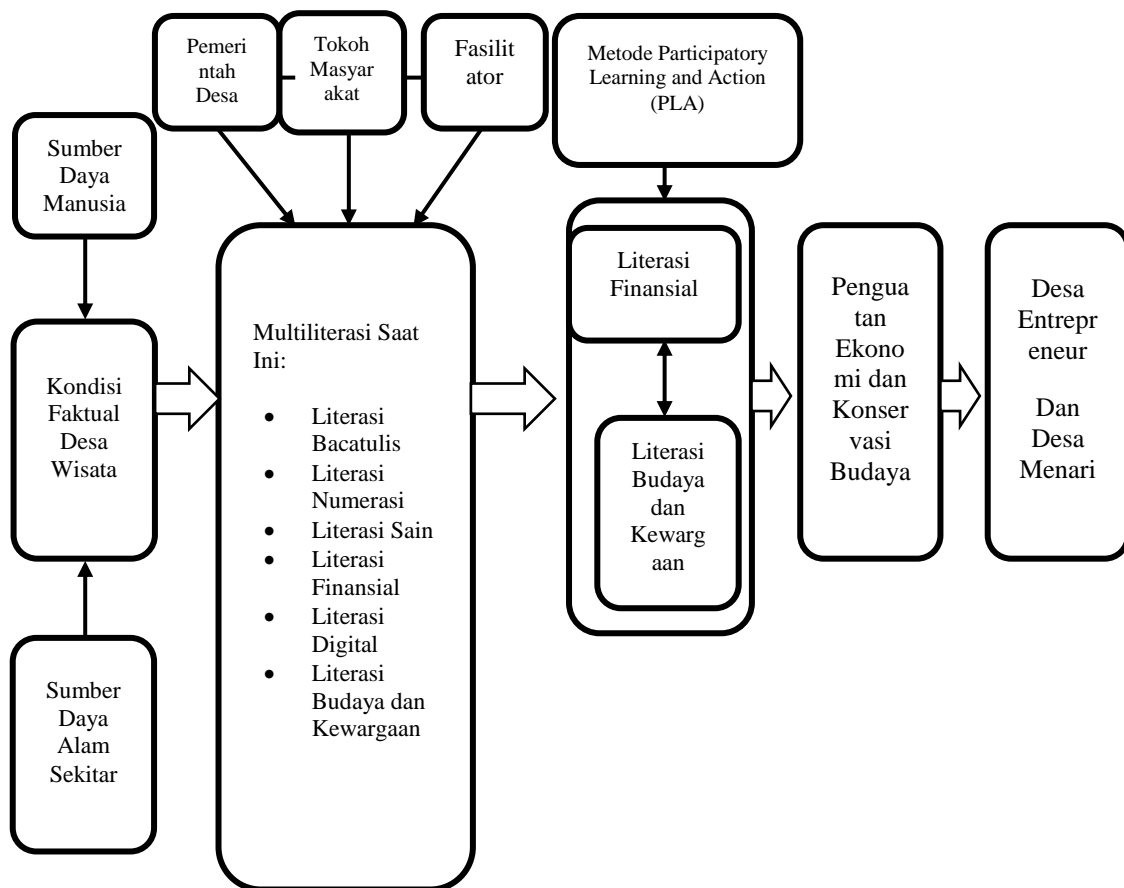
- *Participatory learning and action* merupakan proses belajar secara berkelompok yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara interaktif dalam suatu proses analisis bersama.
- *Multi perspective*, yang mencerminkan beragam interpretasi pemecahan masalah yang riil yang dilakukan oleh para pihak yang beragam dan berbeda cara pfasilitatorngnya.
- Spesifik lokasi, sesuai dengan kondisi dari pihak yang terlibat.
- Difasilitasi oleh dan *stakeholders* (bukan anggota kelompok belajar) yang bertindak sebagai katalisator dan fasilitator dalam mengambil keputusan; dan (jika diperlukan) mereka akan meneruskannya kepada pengambilan keputusan.
- Pengambil perubahan, dalam arti bahwa keputusan yang diambil melalui *Participatory learning and action* (PLA) atau Pembelajaran Partisipasi dan Kaji Tindak akan dijadikan acuan bagi perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan oleh setempat.

Langkah- langkah dalam penerapan *Participatory Learning and Action* sebagai berikut:

- a. Peta. Kegiatan pemetaan sering digunakan sebagai kegiatan pengantar. Mereka mengajak komunitas untuk ikut serta dan berbicara tentang bagaimana mereka melihat daerah di mana mereka tinggal, sumber daya / fasilitas yang tersedia dan apa Penting bagi mereka di lingkungan mereka. Mereka memungkinkan 'orang luar' untuk mulai melihat komunitas melalui mata masyarakat setempat.
- b. Garis Waktu. Garis waktu adalah jenis diagram yang membantu mencatat perubahan dalam komunitas / rumah tangga / kehidupan anggota komunitas seiring waktu. Mereka adalah cara untuk mencatat penfasilitator sejarah yang penting dan tonggak sejarah dari suatu komunitas atau individu, memberikan konteks historis yang lebih luas untuk masalah yang sedang terjadi. Mereka juga dapat memungkinkan peserta untuk menggambar tren.
- c. *Transect Walks*. *Transect Walks* adalah jenis kegiatan pemetaan, yaitu proses berjalan melintasi suatu wilayah dengan anggota komunitas / kelompok anggota masyarakat, mengamati, mengajukan pertanyaan dan mendengarkan sambil jalan. Informasi ini kemudian disajikan secara visual dalam sketsa / diagram transek.
- d. Pohon Masalah. *Problem Trees* 'atau pohon masalah' adalah jenis diagram yang memungkinkan anggota masyarakat untuk melakukannya, menganalisis sebab dan akibat dari masalah tertentu, dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Dibangun di sekitar masalah / masalah fokus, penyebab masalah tersebut ditelusuri di bawah, dan efek di atas.

- e. Aktivitas Pemingkatan. Kegiatan pemingkatan / penilaian memberikan cara bagi anggota masyarakat untuk mempertimbangkan / menilai / memprioritaskan item atau masalah baik relatif satu sama lain atau sesuai dengan kriteria.
- f. Diagram Venn / Chapati. Ini adalah dua jenis diagram yang serupa yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi peran dan hubungan individu, kelompok dan individu dan hubungan di antara mereka.

Berikut Desain Desain *Participatory Learning and Action* (PLA) pada Multiliterasi sebagai Penguatan Ekonomi dan Konservasi Budaya



Gambar 5. Bagan Desain PLA pada Multiliterasi Desa Wisata

Berdasarkan gambar tersebut kegiatan pembelajaran multiliterasi dengan PLA dapat dijelaskan Desa Jojogan memiliki keragaman potensi wisata meliputi potensi wisata alam dan potensi wisata budaya disertai dengan keramahamahaman masyarakatnya menjadikan Desa Jojogan sebagai daerah tujuan wisata yang menjanjikan. Pengembangan pariwisata pedesaan didorong oleh tiga faktor. Pertama, wilayah pedesaan memiliki potensi alam dan budaya yang relatif lebih otentik daripada wilayah perkotaan, masyarakat pedesaan masih menjalankan tradisi dan ritual-ritual budaya dan topografi yang cukup serasi. Beberapa ritual-ritual budaya tersebut antara lain, mulai dari momongi yaitu kegiatan adat yang dilakukan dalam rangka memperingati hari kelahiran ulang tahun anak di Desa Jojogan. Pada adat ini orang tua si anak akan memanggil anak-anak kecil untuk diajak makan Bersama. Hidangan yang disajikan diantaranya adalah nasi putih dengan alas cobek, ikan bakar ataupun goreng, cabe rawit merah, arang dan sambal. Satu hidangan mereka makan bersama, berebut tangan dan saling berebut lauk. Sebelum makan biasanya si ibu akan membacakan do'a selamat, sambil melemparkan arang dan cabe rawit ke atap rumah, lalu memukul-mukulkan pengulek ke kepala masing-masing anak yang turut makan.

Kedua, wilayah pedesaan memiliki lingkungan fisik yang relatif masih asli atau belum banyak tercemar oleh ragam jenis polusi dibandingkan dengan Kawasan perkotaan. Ketiga, dalam tingkat tertentu daerah pedesaan menghadapi perkembangan ekonomi yang relatif lambat, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal secara optimal merupakan alasan rasional dalam pengembangan pariwisata pedesaan.

Desa Jojogan merupakan salah satu desa di Kecamatan Kejajar yang mengembangkan serta memanfaatkan potensi alam dan budaya

masyarakat yang dimiliki menjadi obyek dan daya tarik wisata. Daya tarik yang dimiliki adalah pola tata ruang desa, arsitektur tradisional rumah penduduk, kebun warga yang terkenal dengan istilah 'Plateu' dengan latar belakang pemandangan yang indah, adat istiadat masyarakat lokal, makanan dan minuman tradisional khas desa tersebut. Pengembangan pariwisata di Desa Jojogan tidak terlepas dari peran aktif.

Dusun Tanon merupakan masyarakat yang gemar berkesenian, sejak era jayanya ketoprak klasik, mayoritas masyarakat dusun tanon terlibat baik sebagai pemain ketoprak maupun dalam kelompok karawitan. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, maka mempengaruhi meredupnya kesenian ketoprak masyarakat dusun tanon dan menyerap kesenian tradisi lain. Melihat darah yang mengalir memiliki jiwa seni, maka akan menjadi pintu masuk yang sangat tepat untuk menggali kembali potensi kesenian yang ada dan dikelola dengan baik seperti Pagelaran Kuda Kiprah Malam, wellcome dance topeng ayu, kuda debog, juga memiliki kuliner khas desa misal kripik daun bedagan, getuk sawut, sayur lodeh daun jipang, dan sambel korek versi Tanon.

Dari kalangan muda juga mulai muncul benih-benih bagaimana mengolah potensi alam yang ada tersebut menjadi komoditi pasar yang layak jual. Eksplorasi tersebut memunculkan ide tentang pengolahan susu sapi dari hasil budidaya masyarakat menjadi sabun susu dan minuman yang kaya nutrisi yaitu susu herbal "ArenRay". Kreatifitas warga masyarakat lainnya yang bisa dijumpai adalah kerajinan menggunakan bahan dasar sedotan menjadi barang produktif lainnya. Potensi pertanian yang dipadukan dengan peternakan kedepan menjadi media eksplorasi yang terus dikembangkan untuk memajukan sisi perekonomian masyarakat dusun Tanon. Sehingga homogenitas mereka

diharapkan tetap terjaga sebagai masyarakat yang menekuni kesenian dan produktif secara material.

Dengan memanfaatkan momen 21 April 2012, seluruh warga masyarakat dusun Tanon melakukan peringatan Hari Kartini dengan melakukan kirab budaya sekaligus peresmian Dusun Tanon sebagai Embrio Desa Wisata di wilayah Desa Ngrawan. Dipilihnya tanggal 21 April, terinspirasi perjuangan Ibu Kartini dan inspirasi monumentalnya “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Mereka bersepakat untuk meninggalkan sisi gelap (keterbelakangan secara SDM dan pendapatan) menuju sisi terang (kemajuan, kemandirian dan kemakmuran) dengan tetap berusaha mempertahankan sisi orisinalitas yang ada. Pada saat diresmikan itu dusun Tanon telah menerima sejumlah 825 wisatawan, sesuatu hal yang luar biasa dalam satu bulan bisa menerima tamu sebanyak itu dan memberikan pemasukan pada Dusun dan masyarakat secara langsung.

BAB VIII

PENUTUP

Perkembangan masyarakat pedesaan Indonesia yang semakin pesat dan kompleks menuntut komitmen masyarakat untuk senantiasa belajar, mengikuti dan mengantisipasi perkembangan pembangunan. Desa membangun menempatkan posisi desa bukan lagi sebagai objek melainkan subjek langsung yang memegang kendali perubahan. Perwujudan kewenangan desa mendorong gerakan desa menuju desa yang mandiri dan sejahtera. Peran masyarakat dalam pembangunan desa akan meningkatkan peluang warga masyarakat itu sendiri agar bisa teratasi persoalannya melalui proses pembangunan desa. Cakupan desa membangun tidak lagi hanya pembangunan fisik seperti pembangunan infrastruktur namun kualitas sumberdaya manusianya. Pembangunan kualitas masyarakat desa menjadi salah satu agenda yang tidak dapat terpisahkan dari paradigma desa membangun.

Upaya yang dilakukan untuk membangun kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan literasi sebagai praktik pendidikan. Untuk itu, warga masyarakat perlu memiliki kesempatan memelihara dan mengembangkan kemampuan dalam meningkatkan kualitas diri dan kehidupannya dengan multiliterasi. Multiliterasi menekankan pada suatu kemampuan warga masyarakat untuk dapat mengatasi kondisi baru yang tercipta oleh lingkungan masyarakat dengan membangun masyarakat melalui perubahan pada tingkat individu dan masyarakat dengan adanya persamaan, kesempatan, dan pemahaman global.

Participatory Learning and Action (PLA) atau Pembelajaran dan Kaji Tindak secara Partisipatif sebagai bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dikenal sebagai *learning by doing* atau

belajar sambil bekerja. Multiliterasi dengan desain PLA lebih banyak menekankan pada kebutuhan belajar warga masyarakat desa wisata dan menekankan pada pengembangan motivasi, sikap modern, keterampilan vokasional, dan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada pada masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbarini, Mintarsih. (2013). Pengembangan Bahan ajar pendidikan literasi Usaha Mandiri di PKBM Kabupaten Semarang. Laporan Penelitian DIPA.
- Arbarini, Mintarsih. (2015) Multiliterasi Berbasis Participatory Rural Appraisal pada Multikeaksaraan Masyarakat Pedesaan. Laporan Penelitian Hibah Bersaing Ristekdikti.
- Arbarini, Mintarsih. (2020). Desain Participatory Learning and Action pada Multiliterasi untuk Penguatan Ekonomi dan Konservasi Budaya di Desa Wisata. Laporan Peneltian DIPA UNNES.
- Alam, A. & Ihsan, S. (2012). Role of participatory rural Appraisal in Community Development (A Case Study of Barani Area Development Project in Agriculture, Live Stock and Forestry Development in Kohat. *International journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. August, 2012, Vol.2. no.8., 25-38.
- Beynham, Mike. (2008). *Literacy Practice: Investigating Literacy in Social Contexts*. London: Longman.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2013). *Jawa Tengah dalam Angka*. Semarang
- Chambers, R. 1996. *Participatory rural appraisal: memahami desa secara partisipatif* (terjemahan Y.Sukoco). Yogyakarta: Kanisius.
- Prety, N Jules. et al (1995). *A Trainer's Guide participatory Learning and Action*. London: International Institut for Environment.
- Craig, G. And Mayo, M. (1995). *Community Empowerment: A reader in Participation and Development*. London: Zed Books.
- Dinas Pariwisata Yogyakarta. (2014). *Kajian Pengembangan Desa Wisata di DIY*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata DIY

- Demartoto, A. (2009). *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Duze, C.O. 2010. Effect of participatory learning technique on achievement and attitude of B. Ed, student in educational research methods. *Journals of Social Science*, 22,(3), 185- 189.
- Eko, Sutoro, Arie Sudjito dan Borni Kurniawan. 2013. *Mutiara Perubahan Inovasi dan Emansipasi Desa dari Indonesia Timur*. Yogyakarta: IRE-ACCESS Phase II-AusAID.
- Eko, Sutoro, Arie Sudjito dan Borni Kurniawan. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Penerbit: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta.
- Kemendikbud. 2010. Pendidikan literasi untuk semua. *Jurnal AKRAB: Aksara agar berdaya*. Vol I, Edisi I/Maret/2010,03-19.
- Kim, J.R., Jeong, B., Park, K.S., & Kang Y.S. 2011. Application of the participatory learning Process in Health promotion. *Journal of Agricultur Media Community Health*. Korean. Jun: 36 (2): 130-142.
- Kurniawan, Borni. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Penerbit: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia: Jakarta
- Kuntoro, S. A. 2007. Pendidikan multiliterasi untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. *Jurnal Ilmiah VISI PTK-PNF- Vol 2. No 1- 2007*, 23-27.
- Gall, M.D., Gall, J.P., & Borg, W.R. 2007. *Educational research: An Introduction*. (Eighth edition). United States of America: Pearson Education.
- Hadiwijoyo, S.S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Priasukmana, S. dan Mulyadin, M.R. (2001). *Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah*. LIPI

- Rahardjo, Adisasmita. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Bandung: Graha Ilmu.
- Suryadi. (2006). Buta aksara penyakit sosial mesti diberantas. Retrieved August, 30, 2014. www.jurnalnet.com.
- Theresia, Aprilia et al (2014). *Pembangunan Barbasis Msyarakat*. Bandung: Alfabet
- UNESCO. 2003. *Literacy and empowering people*.
- Yulaelawati, Ella dan Suharti. 2010. Kesenjangan gender di Indonesia: akses terhadap pelayanan pendidikan, hasil belajar, dan ketenagaan. *Jurnal AKRAB: Gender dan Pendidikan Perempuan*, Volume 1, edisi 4, Desember 2010, 32-49.
- Ziegler, M. F & Davis, D. C. (2008). Rural adult literacy in community context: from the margin to the mainstream. *Journal of New Directions for Adult and Continuing Education*, no.117, Spring 2008, 25-35.
- Vagenshtein, Y. F. (2013). How illiterate people learn: Case study of Ethiopian adults in Israel. *Journal of Literate and Technology*. Volume 9, Number 3: Desember 2008, 01- 17.
- Vartiainen, H. (2014). Designing participatory learning. *International Association for Development of the Information Society*.
- Von Korff, Y., Daniell, K., Moellenkamp, S., Bots, P., & Bijlsma, R. (2012). Implementing participatory water management: recent advances in theory, practice, and evaluation. *Ecology and Society*, 17(1).
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*.(Ed.) M. Cole, V. John-Steiner, A. Scribner, and E. Souberman. *Cambridg*.
- Wang, C.Y. (2009). Enhancing the interactive relationship between lifelong learning and social changes to carry out a learning society in Taiwan. *International Journal of Lifelong Education*,27:5,535-542.

Warhurst, R. P. (2009). We really felt part of something: Participatory learning among peers within a university teaching-development community of practice. *International Journal of Academic Development*. Vol. 11, No. 2, November 2006, 111-122.

GLOSARIUM

- Aksara** : Sistem tfasilitator grafis yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan sedikit banyaknya mewakili ujaran.
- Akses** : Jalan masuk
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)** : Kementrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
- Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)** : Usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan hukum.
- Bias** : Sebuah penyajian bahan yang dipenuhi prasangka. Ia juga berarti kesalahan yang konsisten dalam memperkirakan sebuah nilai.
- Brainstorming** : Metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian.
- Dana Desa** : Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota
- Demokrasi** : (Bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah

- dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; 2 gagasan atau pfasilitatorngan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara;
- Demoralisasi** : kemerosotan akhlak; kerusakan moral
- Eksplisit** : gamblang, tegas, terus terang, tidak berbelit-belit (sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah mengenai berita, keputusan, pidato, dan sebagainya); tersurat
- Entitas** : sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik.
- Fasilitator** : seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi.
- Good Governance** : suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.
- Hierarki** : urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan)

Ikhtisar	: pemfasilitatorngan secara ringkas (yang penting-penting saja).
Kedaulatan	: kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya:
Komitmen	: perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu; kontrak.
Kompleks	: suatu hal yang mengandung beberapa unsur yang pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan:
Komponen	: bagian dari keseluruhan; unsur:
Komunitas	: sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama.
Konsep	: ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret: <i>satu istilah dapat mengandung dua -- yang berbeda</i>
Konsisten	: tetap (tidak berubah-ubah); taat asas; ajek
Lembaga Desa	: wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa
Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	: lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
Lembaga Perkreditan	: nama bagi usaha simpan pinjam milik

- Desa (LPD)** : masyarakat *desa* pakraman (*desa* adat) yang berada di Provinsi Bali dan merupakan sarana perekonomian.
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)** : sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
- Lokakarya** : pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya; sanggar kerja
- Motivasi Belajar** : keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu tercapai.
- Otoritas** : hak untuk bertindak
- Padat karya** : kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin.
- Paradigma** : daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut; model dalam teori ilmu pengetahuan; kerangka berpikir
- Paradoks** : suatu situasi yang timbul dari

- sejumlah premis (apa yang dianggap benar sebagai fasililitatorsan kesimpulan kemudian; dasar pemikiran)
- Participatory Action Research (PAR)** : metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas aras bawah yang semangatnya untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan (perubahan kondisi hidup yang lebih baik)
- Participatory Learning and Action (PLA)** : metodologi pendekatan pembangunan (pengembangan masyarakat) yang mengadopsi konsep pembelajaran masyarakat.
- Participatory Rural Appraisal (PRA)** : sebuah metode pemahaman lokasi dengan cara belajar dari, untuk dan bersama dengan masyarakat untuk mengetahui, menganalisa dan mengevaluasi hambatan dan kesempatan melalui multi-disiplin dan keahlian untuk menyusun informasi dan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan.
- Pembangunan Pedesaan** : Pembangunan berbasis pedesaan yang mengedepankan kearifan lokan wilayah pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, fisik/geografis, kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa dan karakteristik kawasan pemukiman,

Pendapatan Asli Desa (PADes)	: pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	: Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.
Pesat	: cepat sekali
Rapid Rural Appraisal (RRA)	: suatu metodologi kuat untuk penelitian pembangunan masyarakat desa.
Sentra	: tempat yang terletak di tengah-tengah (bfasilitatorr dan sebagainya); titik pusat; pusat (kota, industri, pertanian, dan sebagainya); sentral.
Swakelola	: pengelolaan sendiri
Teknik Delphi	: proses yang dilakukan dalam kelompok untuk mensurvei dan mengumpulkan pendapat dari para ahli terkait topik tertentu.
Terminologi	: peristilahan (tentang kata-kata); 2 ilmu mengenai batasan atau definisi istilah.
Undang-Undang Desa	: seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah <u>desa</u> dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan lfasilitatorsan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,

- makmur, dan sejahtera.
- UNESCO** : merupakan sebuah organisasi internasional di bawah PBB yang mengurus semua hal yang berhubungan dengan pendidikan, sains, serta kebudayaan didalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berfasilitator pada keadilan, peraturan hukum, serta HAM.
- Volunteer** : aktivitas altruistik dimana individu atau kelompok memberikan layanan tanpa keuntungan finansial untuk menguntungkan orang lain, kelompok atau organisasi.
- Warga Belajar** : Anggota masyarakat, tanpa batas umur, yang memerlukan suatu atau beberapa jenis pendidikan tertentu, mempunyai hasrat untuk belajar, serta bersedia membiayai sebagian atau segala keperluan belajarnya.
- Workshop** : sebuah kegiatan atau acara yang dilakukan, dimana beberapa orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu berkumpul untuk membahas masalah tertentu dan mengajari para peserta.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Mintarsih Arbarini, M.Pd., adalah dosen Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pendidikan S1 ditempuh di IKIP Semarang lulus tahun 1991, pendidikan S2 ditempuh di IKIP Malang lulus tahun 1998, dan pendidikan S3 ditempuh di Universitas Sebelas Maret, lulus pada tahun 2018. Selain mengajar S1 Pendidikan Luar Sekolah, penulis juga mengajar di Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Mata kuliah pokok yang diampunya Desain Pembelajaran Pendidikan Nonformal, Metode dan teknik Pembelajaran Pendidikan Nonformal, Pendidikan Orang Dewasa, Landasan pendidikan, Filsafat Ilmu, dan Ilmu Pendidikan.

Sebagai akademisi, bidang kajian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditekuni berkonsentrasi berbagai desain dan model pembelajaran pada orang dewasa dan masyarakat, Literasi, Kesetaraan, dan kajian gender. Karya penelitian yang telah dihasilkan meliputi: Aspirasi dan Aktualisasi pengembangan Diri pada Perempuan Bekerja, Citra Wanita karier: Identitas Sosial, Diri Pribadi, dan Pengembangannya dalam Dunia Kerja, Peluang kerja Perempuan Miskin Perkotaan dalam Industri Rumah Tangga, Pilihan Kerja Perempuan Korban PHK dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Keluarga, Penerapan Pendidikan Karakter Program Pendidikan Kesetaraan Paket B pada PKBM di Kota Semarang, Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Literasi Fungsional berbasis Tematik Partisipatif untuk Warga Belajar Keaksaraan Usaha Mandiri di PKBM, Model Pendidikan *Multikeaksaraan Berbasis Participatory Rural Appraisal* bagi Masyarakat Pedesaan untuk Meningkatkan Kemandirian, Model Literasi Berbasis Entrepreneurship dalam Peningkatan Ekonomi Produktif Istri Nelayan Tradisional, Desain Model Multiliterasi pada Perempuan berbasis Nilai-Nilai Konservasi di Desa Wisata, dan Desain *Participatory Learning and Action* pada Multiliterasi untuk Penguatan ekonomi dan Konservasi budaya Desa Wisata.

Publikasi jurnal dan seminar internasional yang telah diikuti meliputi: Implementation of Functional Literacy education by Participatory Learning as Effort of Lifelong Learning, Functional Literacy Education with Participatory Learning Model as an Effort to Develop Women Entrepreneurship in Rural Area, Participatory Learning Model on Adult Literacy Education of Rural Communities, Effect of Participatory Learning Model on Functional Literacy Education, Model of Multiliteracy Education Based on Participatory Rural Appraisal (PRA) for the Society to Increase Independence, Gender Equality and Women Participation in the Development of Tourism Village in the Era of Industrial Revolution 4.0, and Multiliteracy Learning Model for Women as an Effort to Promote Gender Equality.

Penulis juga berperan dalam kegiatan pendidikan di Jawa Tengah dengan menjadi pemateri/presenter pada seminar nasional dan pemateri pada workshop dan juri tingkat propinsi, maupun uji publik BSNP. Selain itu, juga terlibat penyusunan modul pada pendidikan dasar dengan menyusun modul kejar paket A, paket B, dan paket C di direktorat pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2011 s.d 2014. Sebagai bentuk pengabdian di Universitas negeri Semarang, saat ini penulis diberi tugas untuk menjadi Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang periode 2019 – 2023.



Dr. Tri Suminar, M.Pd. lahir di Tulungagung, 26 Mei 1967. Bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Semarang sejak tahun 1995, pada unit kerja Fakultas Ilmu Pendidikan, Jurusan S1 Pendidikan Luar Sekolah / Pendidikan Nonformal. Sejak menamatkan pendidikannya jenjang S3 prodi Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang tahun 2012, mengampu pada prodi S2 Pascasarjana UNNES. Mata kuliah pokok yang

diampanya pada jenjang S1 adalah perubahan sosial, sosiologi dan antropologi, manajemen program PLS, Manajemen Pelatihan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Manajemen Sekolah dan Pengantar Ilmu Pendidikan, sedangkan mata kuliah yang diampu pada jenjang S2 adalah landasan kependidikan, supervisi pendidikan, manajemen sumber daya pendidikan, teori pembelajaran dan perkembangan peserta didik, inovasi dan praktik pembelajaran SD dan mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan.

Sebagai akademisi penulis aktif melakukan penelitian yang menghasilkan beberapa karya pada 10 tahun terakhir antara lain: (1) Model Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dengan Membangun Jaringan Kapital Sosial (multi years); (2) Pemberdayaan Wanita Pabrik dalam Pengembangan Karir dan Peningkatan Kualitas Kehidupannya; (3) Model Pemberdayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan Berbasis Life Skills; (4) Penerapan Model Pendidikan Kecakapan Hidup pada Program Pendidikan Kesetaraan Di Kota Semarang; (5) Analisis Kualitas Layanan Pendidikan Tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES; (6) Evaluasi Kinerja Penilik PAUDNI di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta; (7) Dampak pelaksanaan Model Manajemen Pelatihan Kecakapan Hidup Berbasis Kewirausahaan Keunggulan Lokal dalam Rangka Rintisan Program Desa Vokasi di Kabupaten Semarang; (8) Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Pendidikan Non Formal Melalui Optimalisasi Posdaya Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak; (9) Manajemen Pembelajaran Pendidikan Karakter Pada Sekolah Alam Di Pedesaan dan Perkotaan; (10) Pengembangan Model Pembelajaran

dan Perangkatnya pada Program Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi masyarakat Pedesaan (multi years); (11) Model Perencanaan Pemberdayaan Kaum Perempuan Desa Tertinggal Berbasis Kearifan Lokal pada Komunitas Suku Samin; (12) Model Pemberdayaan Perempuan Suku Samin melalui Pelatihan Kewirausahaan Sosial Berbasis Budaya Lokal sebagai Penguatan Program Desa Wisata; (13) Keefektifan Model Pemberdayaan Perempuan Suku Samin melalui Pelatihan Kewirausahaan Sosial Berbasis Budaya Lokal sebagai Penguatan Program Desa Wisata; (14) Determinan Keefektifan Model Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Digital Dalam Mengembangkan Produktivitas Usaha Kecil Memengah (UKM) Di Kota Semarang; (15) Keefektifan Model Pembelajaran Product Based Training Pendekatan ICARE Terhadap Kemampuan Literasi Kewirausahaan Bagi Perempuan Desa pada Program Pelatihan di Kampung Literasi.

Sebagai akademisi, selain mengampu dan meneliti di bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Manajemen Pendidikan, juga berperan sebagai: (1) Fasilitator pada Diklat Penguatan Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh LP3 UNNES bekerjasama dengan LPPKS Direktorat Tenaga Kependidikan, Ditjen Tenaga Guru dan Kependidikan Kemendikbud; (2) Tim akademisi pengembangan model pada P2PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah; (3) Tim juri Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pendidikan Nonformal Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Judul karya tulis artikel hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal dan prosiding lokal, nasional dan internasional selama 10 tahun terakhir antara lain: (1) Tinjauan Filsafati Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi manajemen Pembelajaran Berbasis Teori Siberetik; (2) Penerapan Model Pendidikan Kecakapan Hidup pada Program Pendidikan Kesetaraan di Kota Semarang; (3) Pengembangan Model Manajemen Pelatihan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Berbasis Kewirausahaan Potensi Keunggulan Lokal dalam Rintisan Desa Vokasi di Kabupaten Semarang; (4) Evaluasi Kinerja Penilik PAUDNI di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta; (5) Model of Learning Development on Program Life Skills Education for Rural Communities; (6) Keefektifan Manajemen Pendidikan Karakter Pilar Konservasi Budaya melalui Strategi Pembelajaran Inkuiri Sosial bagi Mahasiswa Jurusan PLS FIP UNNES; (7) Coastal Community Development Model Based In Nonformal Education Through Optimalization of Family Empowerment as a Poverty Reduction Strategy; (8) Sociocultural Aspect of

Indigeneous-Based Life- Long Learning as Planning Strategy of Empowering Marginal Rural Women; (9) Learning Proses Based On Character Education In Natural School In Semarang City (10) Establish Renewable Resources for ASEAN Economic Community through Entrepreneurship Training as a Learning Model for Tutors of “Kejar Paket” C Programs; (11) Model of Women Empowerment of Samin

Community through Training on Social Entrepreneurship Based on Local Culture. (12) The Influence of Entrepreneurship Training on the Productivity of SMEs in Semarang City, Indonesia

Judul buku ber-ISBN yang disusun adalah (1) Manajemen Sekolah; (2) Model Pemberdayaan Perempuan Desa: Teori dan Praktik; (2) Panduan Pengelolaan Pendidikan Kecakapan Hidup pada Program Pendidikan Anak Usia Dini; (3) Pendampingan yang Efektif Bagi Tutor dengan Model Pembelajaran Introduction, Connection, Application, Reflection, Extension (ICARE).



Drs. Liliek Desmawati, M.Pd Lahir di Jambi, 01 Desember 1959. Bekerja sebagai dosen Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Nonformal, Fakultas Ilmu pendidikan, Universitas Negeri Semarang sejak 1984. Menempuh pendidikan S1 di IKIP Semarang lulus tahun 1983 dan pendidikan S2 ditempuh di IKIP Malang lulus tahun 1998. Mata kuliah pokok yang diampunya Kesehatan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini.

Sebagai bentuk pengabdian kepada Universitas Negeri Semarang, Penulis pernah diberi tugas tambahan menjabat sebagai Sekretaris Jurusan (1999-2003), Kepala Laboratorium (2003-2007), dan Senat Fakultas Ilmu Pendidikan dari tahun 2013 sampai sekarang.

Bidang kajian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditekuni penulis diantaranya: bias gender dalam proses pembelajaran anak usia dini (kasus pada beberapa kelompok bermain dan taman kanak-kanak di Kota Semarang), penerapan strategi mind mapping untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa pada mata kuliah metode pengembangan kognitif dan kreativitas anak usia dini, Manajemen pembelajaran pendidikan karakter pada sekolah alam di pedesaan dan perkantoran, Model kewirausahaan masyarakat melalui desa vokasi di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, implementasi peran orangtua dalam pembinaan pemahaman motif pernikahan bagi anak dalam lingkup pendidikan informal, pelatihan membuat olahan pangan lokal bagi perempuan pedesaan pasca keaksaraan di desa Jombor, kecamatan Tuntang, kabupaten Semarang, Pendampingan kelompok usaha potong rambut dan pelatihan kerajinan tangan dari kain perca bagi warga belajar PKBM tunas harapan Kota Semarang, dan pendidikan kewirausahaan purnakarya melalui usaha bakso sapi bagi anggota KPRI Handayani Kota Semarang.

Keaktifan dalam kegiatan publikasi jurnal dan seminar yang pernah diikuti meliputi: investasi modal sosial dalam pengembangan school based management (konsep dasar pendidikan untuk orang miskin), interaksi sosial warga belajar paket B pada UPTD SKB Ungaran Kabupaten Semarang, dan

Non-Formal Learning Strategy Based On Tahfidz And Character In The Primary School.

Penulis pernah berperan sebagai juri lomba jambore Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 dan 2011. Selain itu, pernah menjadi Tim Evaluator dan Visitasi PKH-PNFI Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012. Penulis juga aktif dalam keanggotaan asosiasi profesi di Ikatan Akademisi Pendidikan Nonformal Indonesia sejak 2010 hingga sekarang. Motto hidupnya adalah selalu mencoba, karena keberhasilan selalu menunggu.

DESA MEMBANGUN

Participatory Learning and Action pada Multiliterasi Masyarakat Desa Wisata

Desa membangun menempatkan posisi desa bukan lagi sebagai objek melainkan subjek langsung yang memegang kendali perubahan. Perwujudan kewenangan desa mendorong gerakan desa menuju desa yang mandiri dan sejahtera. Peran masyarakat dalam pembangunan desa akan meningkatkan peluang warga masyarakat itu sendiri agar bisa teratasi persoalannya melalui proses pembangunan desa. Cakupan desa membangun tidak lagi hanya pembangunan fisik seperti pembangunan infrastruktur namun kualitas sumberdaya manusianya. Pembangunan kualitas masyarakat desa menjadi salah satu agenda yang tidak dapat terpisahkan dari paradigma desa membangun. Upaya yang dilakukan untuk membangun kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan literasi sebagai praktik pendidikan. Untuk itu, warga masyarakat perlu memiliki kesempatan memelihara dan mengembangkan kemampuan dalam meningkatkan kualitas diri dan kehidupannya dengan multiliterasi. Multiliterasi menekankan pada suatu kemampuan warga masyarakat untuk dapat mengatasi kondisi baru yang tercipta oleh lingkungan masyarakat dengan membangun masyarakat melalui perubahan pada tingkat individu dan masyarakat dengan adanya persamaan, kesempatan, dan pemahaman global. Pembahasan buku ini mengarah pada Participatory Learning and Action (PLA) atau Pembelajaran dan Kaji Tindak secara Partisipatif sebagai bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dikenal sebagai learning by doing atau belajar sambil bekerja. Multiliterasi dengan desain PLA lebih banyak menekankan pada kebutuhan belajar warga masyarakat desa wisata dan menekankan pada pengembangan motivasi, sikap modern, keterampilan vokasional, dan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada pada masyarakat desa.



FASTINDO
MAKE U EASY

PENERBIT FASTINDO

Jl. Prof. Sudarto, LPPU II No. 12 A
Tembalang, Semarang
Telp. (024) 764 805 90

ISBN 978-602-6627-85-8

